



PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

Tahun 2025



GEDUNG PUSAT KEBUDAYAAN SAWAHLUNTO

**Badan
Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kota Sawahlunto**

**Januari
2026**



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bagindo Aziz Chan Telp. (0754) 61550 Kode Pos 27424

Home page : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail: informasi@sawahlunto.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sawahlunto, 6 April 2026

Plt. INSPEKTUR DAERAH


ZAMRIL FIRDAUS, S.STP, MM
NIP.198211242001121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto Tahun 2025 dapat disusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan kinerja ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja, agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sawahlunto, Januari 2026
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



RONI ARMIS, ST. MT. MEng. PhD
NIP.19800131 200501 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Capaian Kinerja

Capaian kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025 dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran strategis yang digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1, Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan dengan target kinerja 100 dan capaian kinerja 95,04%. Dukungan anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 384.353.180,- dan terealisasi sebesar Rp. 241.074.314,- (62,7%). Untuk kinerja sasaran ini terdiri dari 2 program yaitu 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Sasaran strategis 2, Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan, dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100%. Dukungan anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 34.114.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.617.507,- (7,7%). Untuk kinerja sasaran ini terdiri dari 1 program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Sasaran strategis 3, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Barenlitbangda, dengan target kinerja BB (70,01) dan capaian kinerja B (69,61). Dukungan anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 5.825.852.913,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.653.147.730,- (97,04%). Untuk kinerja sasaran ini terdiri dari 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Sasaran strategis 4, Tercapainya Peningkatan Inovasi Daerah dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah dan target kinerja 73 dengan capaian kinerja 66,08. Dukungan anggaran untuk sasaran ini menyatu dengan anggaran sasaran strategis 2.
5. Sasaran strategis 5, Optimalnya pengelolaan Keuangan Barenlitbangda dengan indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Barenlitbangda dan target kinerja 97% dengan capaian 94,64%. Dukungan anggaran untuk sasaran ini menyatu dengan anggaran sasaran strategis 3.

Secara total Barenlitbangda Kota Sawahlunto mendapat alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 6.244.320.293,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.909.739.551,- atau sebesar 94,64%. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 334.580.742,- atau sebesar 5,36%. Beberapa hal yang menimbulkan efisiensi anggaran tersebut diantaranya :

- a. Sisa gaji dan tunjangan ASN
- b. Honorarium narasumber.
- c. Belanja makan dan minum rapat.
- d. Belanja cetak.
- e. Belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
- f. Belanja listrik dan air.

Faktor Penghambat/ Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

1. Masih rendahnya kapasitas fungsional perencana.
2. Belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan musrenbang dan konsultasi publik.
3. Belum konsistennya perencanaan program prioritas dengan penganggaran.
4. Tingkat kehadiran perangkat daerah yang kompeten dalam ketersediaan data dan informasi masih rendah.
5. Adanya efisiensi anggaran.

Upaya yang telah Dilakukan dalam Rangka Pencapaian Realisasi Kinerja

1. Meningkatkan kapasitas fungsional perencana melalui pelatihan, bimtek dan workshop baik secara daring maupun offline.
2. Mengkoordinir PD untuk melaksanakan Forum Perangkat Daerah.
3. Menjaga keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan, sehingga seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja.

4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Penghargaan yang Diperoleh



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Organisasi	1
1.1.a Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.1.b Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.1.c Struktur Organisasi	26
1.1.d Sumber Daya manusia	27
1.1.e Sarana da Prasarana	32
1.2 Aspek Strategis Organisasi	33
1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued)	34
1.4 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2025	37
1.5 Sistematika Penyajian	40
BAB II PERENCANAAN KINERJA	42
2.1 Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026	42
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	42
2.1.2 Strategi dan Kebijakan	45
2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan	49
2.3 Perubahan Anggaran Tahun 2025	50
2.3.1 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	54
2.4 Instrumen Pendukung Kinerja Barenlitbangda	55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	56
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	56
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	57
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	59
3.4 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025	105
3.5 Penghargaan Tahun 2025	108
BAB IV PENUTUP	110
4.1 Kesimpulan	110
4.2 Tindak Lanjut Kedepan	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan 28
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 29
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Golongan 30
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin 31
Tabel 1.5	Daftar Inventaris Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025 32
Tabel 1.6	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 35
Tabel 1.7	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Barenlitbangda Tahun 2025 37
Tabel 2.1	Target Kinerja, Tujuan dan Sasaran Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 42
Tabel 2.2	Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda 43
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 46
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 48
Tabel 2.5	Perubahan Anggaran Belanja Barenlitbangda Tahun 2025 50
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 53
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Indikator Capaian Kinerja PK 56
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 s/d 2025 57
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Pemko Tahun 2025 58
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah 2025 64
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Program 2025 90
Tabel 3.6	Perbandingan Indeks Perencanaan Pembangunan 93
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1 94
Tabel 3.8	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2 97
Tabel 3.9	Hasil Penilaian AKIP Barenlitbangda 99
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3 100
Tabel 3.11	Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah 102

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Tugas dan Fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto	1
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Barenlitbangda	27
Gambar 3.1	Penghargaan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2025	109

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1.1	Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Grafik 1.2	Persentase Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Golongan	31
Grafik 1.3	Persentase Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin	32
Grafik 3.1	Sasaran 1	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

1.1.a. Dasar Pembentukan Organisasi

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, menyebabkan terjadi perubahan nomenklatur dan perubahan tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto. Seiring dengan perkembangan dan penataan organisasi oleh Kemenpan RB, sehingga Pemerintah Kota Sawahlunto mengeluarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan uraian diatas, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota di bidang perencanaan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Tugas Dan Fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto



1.1.b. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Fungsi dan tugas dari Kepala, Sekretaris dan masing-masing Bidang sesuai Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto dirinci sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- a) Kepala Badan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
 - e. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah.
 - f. Penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

- g. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- h. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
- j. Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
- k. Memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- l. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- d. Pengkoordinasian urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan, dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol penatausahaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, inventaris dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, serta asset Badan.
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, investarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja.
 - c. Pengadaan dan pemeliharaan terhadap inventaris dan perlengkapan Badan.
 - d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian.
 - e. Pelaksanaan dan pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
 - f. Pengarsipan seluruh naskah serta naskah perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

- g. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kegiatan badan kepala sekretaris, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, pengevaluasian laporan serta pendokumentasian kegiatan dari masing-masing bidang pada badan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan.
 - b. Pelaksanaan proses penyusunan program kerja, bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
 - c. Pengoordinasian penyusunan perencanaan daerah yang meliputi penghimpunan rencana program/ kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang pada Badan.
 - d. Pengumpulan dan penatausahaan naskah, program kerja, dan laporan Badan.
 - e. Pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan memberikan informasi tentang rencana, program dan hasil pelaksanaan kegiatan Badan.

- f. Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada sekretaris.
- g. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup tugasnya, dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi anggaran dan keuangan Badan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Badan.
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelapor Badan.
 - c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) berikut dokumen lampirannya yang diajukan Bendaharawan pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - d. Melakukan verifikasi dan penelitian kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara.
 - e. Pembuatan surat perintah membayar (SPM).
 - f. Menyiapkan surat pengesahan pertanggung jawaban belanja maupun pertanggungjawaban penerimaan yang diajukan bendahara.

- g. Melaksanakan proses akuntansi Badan.
- h. Menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan badan terdiri dari neraca, aliran kas, realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan keuangan badan.
- j. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kegiatan badan kepala sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a). Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas: Memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi peningkatan investasi dan pembangunan kewirausahaan, pembangunan ekonomi kerakyatan, kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga.
- b). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyusun kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang ekonomi.
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang ekonomi.
 - d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, pembangunan ekonomi kerakyatan, kepariwisataan budaya, pemuda dan olahraga.
 - e. Penyelenggaraan Analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, serta

- untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
- f. Pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kepariwisataan, budidaya, pemuda dan olahraga.
 - g. Pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan sub bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pengembangan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang peningkatan

investasi dan pengembangan kewirausahaan.

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
- d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
- e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
- f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang pembangunan

ekonomi kerakyatan.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - b. Penyelenggarakan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang pembangunan ekonomi kerakyatan dari lembaga pemerintahan tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Pengembangan, Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan

Kepariwisataan, Budaya, Pemuda dan Olahraga.

- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisataan, Budaya, Pemuda dan Olahraga, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota

- a). Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur kota yang meliputi penataan keciptakaryaan, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan dan peningkatan fungsi utilitas kota.
- b). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kota.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang infrastruktur kota.
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang infrastruktur kota.
 - d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang penataan keciptakaryaan, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan dan peningkatan fungsi utilitas kota.

- e. Penyelenggaraan analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan infrastruktur kota.
- f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga;
- g. Pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang penataan keciptakarya, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan dan peningkatan fungsi utilitas kota.
- h. Pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kota.
- j. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur Kota, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciaptakarya

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciaptakarya mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang penataan keciptakarya.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciaptakarya menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Penataan Keciaptakaryaan.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Penataan Keciaptakaryaan.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Keciaptakaryaan.
- d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Penataan Keciaptakaryaan.
- e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Penataan Keciaptakaryaan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
- f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penataan Keciaptakaryaan.
- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- i. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Keciaptakaryaan, dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan

Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup.

- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada

kepala bidang.

- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata ruang dan Lingkungan Hidup, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.

- f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- i. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota, dan
- k. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

- a) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang sosial budaya.
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup

bidang sosial budaya.

- d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Penyelenggaraan Analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan sosial budaya daerah.
- f. Pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- g. Pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah

di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mental spiritual.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
 - d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
 - f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pengembangan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan

lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual, dan

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - d. Pengkajian analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Kesehatan dan

Keluarga Berkualitas.

- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
- h. Penyampaian laporan tugas secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang peningkatan kesehatan dan keluarga berkualitas, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

- d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
- f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pengembangan berikutnya.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi pengkajian dan Analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan dan pengembangan data pembangunan daerah serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.

- b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
- c. Penyelenggaraan koordinasi program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang dalam bidang pengkajian dan Analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data dan informasi pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
- f. Penyelenggaraan pengkajian dan analisa perencanaan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- g. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengkajian dan Analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data dan informasi pembangunan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala melalui sekretaris.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi program pembangunan, dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

6.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengumpulan data perencanaan pembangunan, pengembangan data perencanaan pembangunan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan.
 - b. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pengendalian data perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Pengkoordinasian program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang dalam lingkup penyelenggaraan data dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
 - d. Pengembangan data dan informasi pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan capaian hasil program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
 - f. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala badan, dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2. Kelompok Jabatan Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisa potensi dan perencanaan pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Pengkajian dan Analisa Pembangunan.
 - b. Penyelenggaraan pengkajian dan Analisa pengembangan potensi strategis pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - c. Pengkoordinasian program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam lingkup pelaksanaan pengkajian dan analisa pengembangan pembangunan daerah.
 - d. Penyelenggaraan publikasi hasil penelitian dan Analisa pembangunan dan mengkoordinasikan rencana tindak lanjutnya.
 - e. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang, dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan rumusan perencanaan dan melaksanakan penyusunan perencanaan program pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok

Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan perencanaan program pembangunan daerah.
- b. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan.
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan Perangkat Daerah.
- e. Pengkajian dan analisa dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan nasional untuk disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- f. Pengumpulan dan penatausahaan naskah-naskah dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang daerah.
- g. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang, dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1.c. Struktur Organisasi Barenlitbangda

Struktur organisasi Barenlitbangda dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Struktur Organisasi Barenlitbangda



Tata Kerja Barenlitbangda

- a. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
- b. Kepala Badan bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- c. Kepala Badan mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.
- d. Setiap pegawai dilingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dalam menyampaikan laporan.
- e. Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

1.1.d. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel

perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada Tahun 2025, Barenlitbangda Kota Sawahlunto memiliki pegawai sebanyak 49 orang yang terdiri atas 7 orang struktural, 28 orang fungsional tertentu, 14 orang fungsional umum, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fung. Tertentu	Fung. Umum	PTT	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	1	4	8	-	14
3.	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	-	1	-	2	4	-	7
4.	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	1	-	6	-	-	7
5.	Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-	1	-	7	2	-	10
6.	Bidang Litbang	-	1	-	9	-	-	10
	Jumlah	1	5	1	28	14	-	49

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025

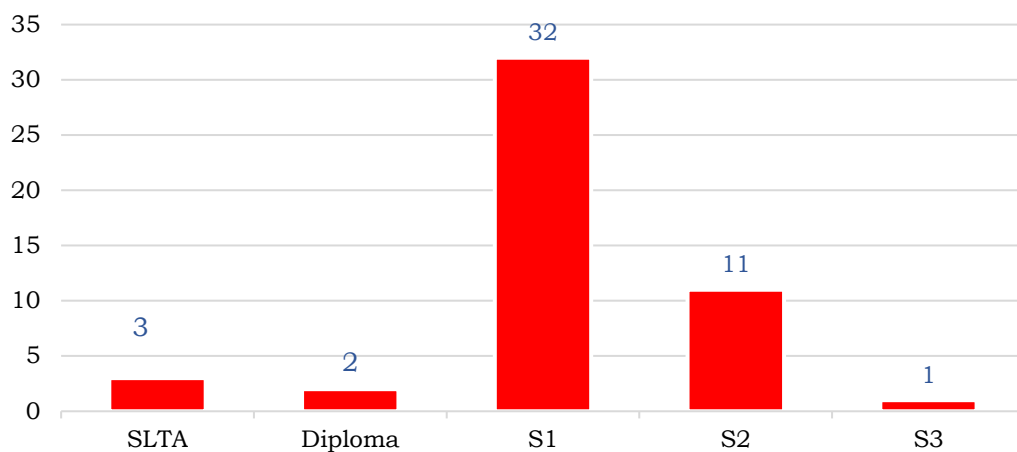
Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi Pegawai dilingkungan Barenlitbangda Kota Sawahlunto didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 34 orang atau sebesar 69,4%, Strata 2 sebanyak 10 orang atau sebesar 20,4%, Strata 3 sebanyak 1 orang atau sebesar 2,04%, Diploma 3 sebanyak 2 orang atau sebesar 4,08% dan SLTA sebanyak 2 orang atau sebesar 4,08%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3	D3	SLTA	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	8	-	1	2	3	14
3.	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	4	3	-	-	-	7
4.	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	3	-	-	-	7
5.	Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	9	1	-	-	-	10
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	7	3	-	-	-	10
	Jumlah	32	11	1	2	3	49

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025

Grafik 1.1
Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025

Sementara itu berdasarkan golongan, komposisi pegawai Barenlitbangda Kota Sawawahlunto terbanyak adalah Golongan III sebanyak 37 orang atau sebesar 75,5%, Golongan IV sebanyak 9 orang atau sebesar

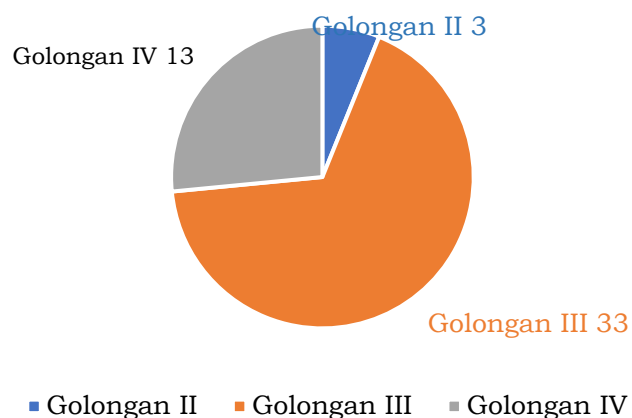
18,4% dan Golongan II sebanyak 3 orang atau sebesar 6,12%. Secara lengkap komposisi pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	3	10	1	14
3.	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	-	-	4	3	7
4.	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	4	3	7
5.	Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-	-	9	1	10
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	6	4	10
	Jumlah		3	33	13	49

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025

Grafik 1.2
Persentase Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Golongan



Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025

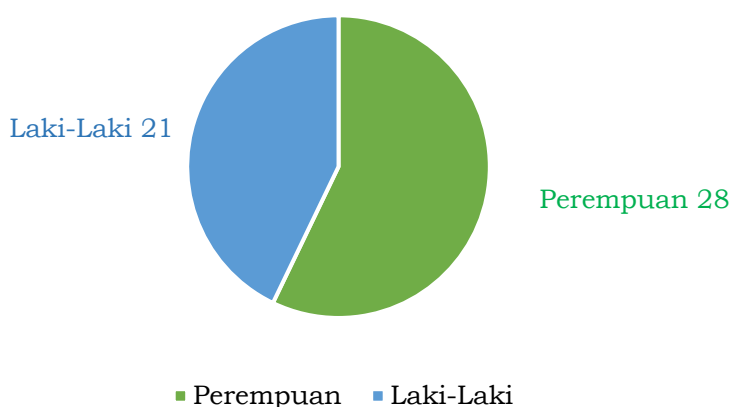
Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto terbanyak adalah perempuan yaitu sebanyak 28 orang atau sebesar 59,6% dan laki-laki sebanyak 19 orang atau sebesar 40,4%. Secara lengkap komposisi pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	1	1
2.	Sekretariat	7	7	14
3.	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	3	4	7
4.	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2	5	7
5.	Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	3	7	10
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	6	4	10
	Total	21	28	47

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025

Grafik 1.3
Persentase Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025

1.1.e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat komunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Barenlitbangda Kota Sawahlunto dirasa cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat dijalankan dengan cepat dan profesional.

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahunnya dilakukan pemeliharaan atau perbaikan (rehabilitasi) dan penambahan guna menggantikan sarana dan prasarana yang mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Sarana dan prasarana pendukung layanan di Barenlitbangda Kota Sawahlunto sampai dengan kondisi Tahun 2025 secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Daftar Inventaris Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1.	Mini Bus	4	19.	Camera Video	1
2.	Sepeda Motor	9	20.	Tangga Aluminium	1
3.	GPS	3	21.	Karpet	3
4.	Lemari Kayu	18	22.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
5.	Rak Besi	1	23.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
6.	Filing Cabinet Besi	5	24.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18
7.	CCTV	3	25.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6
8.	Mesin Absensi	1	26.	Meja Tamu Biasa	1
9.	Infocus	4	27.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
10.	Meja Kerja Besi/ Metal	1	28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
11.	Meja Rapat	1	29.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	32

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	No.	Nama Barang	Jumlah Barang
12.	Kursi Rapat Futura	39	30.	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	8
13.	Kusi Tamu Jepara	1	31.	Microphone/Wireless MIC	1
14.	Kursi Tamu 4 Ps	1	32.	Layar Film/ Projektor	3
15.	Sofa	1	33.	Bendera Merah Putih/ 22 meter	1
16.	Lemari Es	1	34.	P.C Unit	11
17.	A.C Split	10	35.	Lap Top	27
18.	Televisi	1	36.	Printer	18

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa kondisi sarana dan prasarana yang ada di Barenlitbangda Kota Sawahlunto cukup memadai, tapi pada kenyataannya banyak dari peralatan dan mesin seperti lap top, PC dan kendaraan operasional yang sudah tidak berfungsi secara optimal. Disamping itu juga fasilitas ruang rapat yang dimiliki Barenlitbangda juga belum memadai mengingat frekuensi koordinasi/rapat yang padat.

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto mendukung tujuan 4 (empat) yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, sedangkan sasaran yang di dukung ada 2 (dua) sasaran

yaitu sasaran 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dan sasaran 3) Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah, dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah.

Dari tujuan dan sasaran Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 diatas, maka Barenlitbangda Kota Sawahlunto memiliki 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

- Tujuan 1 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, dengan 2 (dua) sasaran : 1) Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan dan 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Barenlitbangda.
- Tujuan 2 yaitu Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan.

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda selama lima tahun terakhir, tentu ada tantangan dan peluang untuk tiga tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Barenlitbangda. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Barenlitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang perencanaan, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Barenlitbangda Kota Sawahlunto sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.6
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perencanaan
			Kurang memadainya data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan
			Masih kurangnya komitmen dalam menyusun dokumen perencanaan
			Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah
			Kesesuaian dan sinergisitas dokumen perencanaan belum optimal
			Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah
		Belum optimalnya fungsi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik
			Belum adanya kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan (Dewan Riset Daerah).
			Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal
			Belum optimalnya koordinasi perencanaan yang efektif pada Bidang ekonomi, Sosial Budaya dan infrastruktur
2	Peningkatan Kapasitas kelembagaan belum optimal	Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketepatan penyelesaian pekerjaan
			Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
			Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah
			Belum tersedianya SOP Perencanaan

Sumber : Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dirumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan 3 (tiga) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dimasa yang akan datang.

Perumusan isu-isu strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto untuk 3 (tiga) tahun mendatang didasarkan pada dua aspek yaitu : permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dan gambaran pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pelayanan Barenlitbangda berdasarkan tugas dan fungsinya, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Barenlitbangda Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan dan rencana tindak yang terukur dan jelas.
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Meningkatkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
5. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/ informasi perencanaan pembangunan.

6. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion (FGD), seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.
7. Perlu ditingkatkan koordinasi antar bidang, Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
8. Peningkatan kualitas dan penerapan inovasi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1.4 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Barenlitbangda Tahun 2025 telah dilakukan tindak lanjut melalui perbaikan kinerja pada rentang waktu Bulan Januari sampai dengan Maret 2026, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Barenlitbangda Tahun 2025

No.	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
A.	Perencanaan Kinerja	
	1. Membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 semua ASN dalam organisasi disusun sesuai dengan level jabatannya.	Telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 untuk seluruh ASN di Barenlitbangda
	2. Membuat rencana aksi kinerja pada semua bidang dan sekretariat, disusun dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui atasan langsung.	Seluruh ASN Barenlitbangda telah membuat rencana aksi Tahun 2026 dan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsung
	3. Menyusun crosscutting antar perangkat daerah dan antar bidang yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kerja, strategi, kebijakan dan aktivitas kerja yang berkaitan.	Telah disusun crosscutting pada triwulan III Tahun 2025

No.	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
	4. Menetapkan indikator kinerja sesuai pada levelnya untuk memastikan keselarasan antar tujuan strategis organisasi dengan tujuan unit kerja dibawahnya, serta untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja secara efektif.	Seluruh ASN di Barenlitbangda telah menyusun PK yang berisi sasaran, indikator dan target yang sesuai pada levelnya dalam mendukung kinerja atasan dan kinerja organisasi
B.	Pengukuran Kinerja	
	1. Melakukan pengukuran capaian/realisasi rencana aksi kinerja secara berkala setiap triwulan pada level eselon II, III dan dibawahnya, sehingga dapat diketahui target kinerja yang dapat dicapai/tidak dan kendala yang dihadapi serta tindak lanjut mengatasinya.	Telah dibuat aplikasi monev renja dan saat ini dalam proses pengembangan untuk pembuatan monev capaian kinerja PD dan juga telah dilakukan evaluasi kinerja individu setiap triwulannya pada aplikasi ASN Digital
	2. Menggunakan pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja organisasinya.	Telah dibuat aplikasi monev renja dan saat ini dalam proses pengembangan untuk pembuatan monev capaian kinerja PD dan juga telah dilakukan evaluasi kinerja individu setiap triwulannya pada aplikasi ASN Digital

No.	Saran/ Rekomendasi		Tindak Lanjut
C.	Pelaporan Kinerja		
	1.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor penyebab peningkatan/keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis, selaras dengan kinerja yang dijanjikan.	Telah dilakukan evaluasi terhadap laporan kinerja dari level eselon II, III, IV dan fungsional serta staf pada rapat penyusunan PK Tahun 2026
	2.	Melaporkan kinerja setiap triwulan bagi seluruh ASN secara berjenjang untuk memberikan informasi yang terukur mengenai capaian kinerja kepada pihak yang berkepentingan, serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.	Seluruh ASN di Barenlitbangda telah melaporkan kinerjanya setiap triwulan melalui aplikasi ASN Digital
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
	1.	Melakukan monitoring dan evaluasi atasan langsung secara berjenjang atas capaian/realisasi rencana aksi kepada semua bawahannya, sehingga dapat mengidentifikasi masalah sejak dini, melakukan perbaikan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti yang ada.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang oleh atasan setiap triwulannya melalui aplikasi ASN Digital dan telah diberikan umpan balik terhadap kinerja yang telah dicapai
	2.	Memberikan reward dan punishment kepada pegawai atas capaian/realisasi kinerja individu untuk meningkatkan motivasi dan kinerja serta membentuk perilaku positif.	Telah dilakukan punishment berupa pemotongan TPP terhadap ASN yang bermasalah sesuai aturan yang berlaku
	3.	Membuat Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja untuk mendapatkan laporan kinerja organisasi yang berkualitas dan sesuai standar.	Telah disusun Tim Penyusun Laporan Kinerja pada awal Tahun 2026
	4.	Menyusun dan menerapkan kebijakan/pedoman penilaian pemberian reward dan punishment kepada pegawai atas capaian kinerja untuk	Dalam proses pembahasan dan selain itu juga

No.	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
	mendorong peningkatan implementasi AKIP dilingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto.	dilakukan pemotongan terhadap TPP terhadap ASN yang bermasalah sesuai aturan yang berlaku

Sumber : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Barenlitbangda Tahun 2025

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan :

1.1 Gambaran Organisasi

- Dasar Pembentukan Organisasi
- Tupoksi
- Struktur Organisasi
- Sumber Daya Manusia
- Sarana dan Prasarana

1.2 Aspek Strategis Organisasi

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued)

1.4 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan :

- Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- Hasil Pengukuran Kinerja
- Capaian Kinerja Organisasi

d. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langka-langkah untuk peningkatan kinerja kedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan dan masyarakat Kota Sawahlunto, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Untuk saat ini Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan tujuan, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 3 (tiga) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		Nilai SAKIP	B (62,19)	B (62,5)	B (62,81)	B (62,81)
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	100	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda	Nilai SAKIP Barenlitbangda	BB	BB	A	A
2. Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	60,01	63,01	66,01	66,01
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	100	100	100	100

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto selama periode Renstra 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		Nilai SAKIP	Penilaian Kemenpan RB terhadap Kinerja Utama melalui Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Laporan Kinerja 30%, Pelaporan Kinerja 15% dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%	62,19	62,5	62,81
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	(60% Capaian Sasaran Pemko + 20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah + 20% Capaian Sasaran Program) x 100%	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda	Nilai SAKIP Barenlitbangda	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kota Sawahlunto	BB	BB	A
2.	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	60,01	63,01	66,01
		Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(Jumlah Penelitian yang Ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Penelitian) x 100%	100	100	100

Sumber : Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto adalah strategi dan arah kebijakan Barenlitbangda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program dan prioritas dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Barenlitbangda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja menggagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Barenlitbangda untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dipakai untuk mencapai tujuan jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan RPD Kota Sawahlunto.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan perencanaan dan pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan.
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program.
2. Peningkatan perencanaan dan pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan.
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program.

3. Peningkatan perencanaan dan pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan.
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program.
4. Peningkatan perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah.
5. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong terciptanya inovasi-inovasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah.
 - b. Meningkatkan fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto adalah strategi dan arah kebijakan Barenlitbangda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Barenlitbangda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Sawahlunto dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Barenlitbangda pada Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 secara ringkas dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

TUJUAN 4 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF			
SASARAN 1 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi	Pengembangan Sistim perencanaan , penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
			Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan
		Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan
		Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas konsistensi dan sinergisitas perencanaan melalui sistim yang tranparan akuntabel dan akurat
			Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA) dan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT	Menerapkan Aplikasi e-budgeting (SIPKD) secara terintegrasidalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
		Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Mengembangkan sistem database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara OPD dengan Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto
			Pengembangan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan
		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara Konsisten dan berkelanjutan	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan komitmen dan motivasi kerja yang kuat dalam proses perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

TUJUAN 4 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF			
SASARAN 1 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan koordinasi transparan dan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses baltom up dan top down Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Barenlitbangda	Peningkatan kualitas SDM Perencana di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Desa
		Penyempurnaan dan penerapan SOP Barenlitbangda	Evaluasi dan revisi SOP Barenlitbangda
			Penerapan SOP secara konsisten
		Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan	Penetapan kinerja Barenlitbangda
			Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN
2. Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah	Meningkatkan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Barenlitbangda	Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan	Penetapan kinerja Barenlitbangda
			Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN
		Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai	Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor

Sumber : Renstra Perubahan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Barenlitbangda Kota Sawahlunto dengan Wali Kota Sawahlunto pada tanggal 2 Januari 2025 dan telah dilakukan perubahan pertama pada tanggal 3 Maret 2025 disebabkan karena pergantian Pj Wali Kota ke Wali Kota terpilih. Selanjutnya dilakukan lagi perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 15 Oktober 2025 disebabkan adanya perubahan kegiatan dan rasionalisasi anggaran. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan menjadi kinerja seluruh unit kerja dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	100
2.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda	Nilai SAKIP Barenlitbangda	BB (70,01)
4.	Tercapainya Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	73
5.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Barenlitbangda	Persentase Realisasi Anggaran Barenlitbangda	97

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.3. Perubahan Anggaran Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pada Tahun 2025 Barenlitbangda Kota Sawahlunto melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 6.366.547.630,-** dengan rincian Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN) sebesar **Rp. 5.142.507.455,-** dan

Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 1.224.040.175,-**. Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2025 anggaran belanja menjadi sebesar **Rp. 6.244.320.293,-** dengan rincian Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN) sebesar **Rp. 5.357.740.848,-** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 886.579.445,-**.

Anggaran Perubahan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebesar Rp. 6.244.320.293,- digunakan untuk mendukung 4 (empat) program 13 (tiga belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Adapun ke 4 (empat) program tersebut salah satunya program pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dengan 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Adapun program utama terdiri atas 3 (tiga) program yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan serta program penelitian dan pengembangan daerah yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Anggaran Belanja Barenlitbangda Tahun 2025
Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)
PERENCANAAN			6.210.206.093
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5.825.852.913
I.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13.452.000
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.452.000
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.405.488.848
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.357.740.848
	2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	47.748.000
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		89.111.585
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.509.975
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.128.810
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.472.800
IV.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		160.910.080
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.011.744

	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.898.336
V.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		156.890.400
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.278.400
	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.482.000
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.130.000
B.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		292.384.350
I.	Penyusunan Pendanaan dan Perencanaan		257.243.100
	1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	5.220.120
	2.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	15.390.400
	3.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	24.958.380
	4.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	211.674.200
II.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		893.850
	1.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	893.850
III.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		34.247.400
	1.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	34.247.400
C.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		91.968.830
I.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		20.664.820
	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.311.480
	2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.286.330
	3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.026.860
	4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.218.400
	5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.967.150
	6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.854.600

II.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)		34.309.850
	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.045.400
	2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.268.620
	3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7.552.850
	4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.019.600
	5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.586.360
	6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.837.020
III.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		36.994.160
	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.310.700
	2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.090.300
	3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8.563.680
	4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.997.400
	5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.441.180
	6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.590.900
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			34.114.200
I.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		34.114.200
	1.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	34.114.200
TOTAL			6.244.320.293

Sumber : DPA Perubahan Barenlitbangda Tahun 2025

2.3.1. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Perubahan anggaran belanja Tahun 2025 Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Program	Anggaran Awal	%	Anggaran Perubahan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.603.173.730	88,00	5.825.852.913	93,30	-
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	551.554.630	8,66	292.384.350	4,68	-
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	150.708.070	2,37	91.968.830	1,47	-
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	61.111.200	0,96	34.114.200	0,55	-
Total		6.366.547.830	100	6.244.320.293	100	

Sumber : DPA Perubahan Barenlitbangda Tahun 2025

Alokasi anggaran strategis digunakan untuk membiayai 4 program yang ada di Barenlitbangda yaitu Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diampu oleh 3 bidang/sektoral (Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota), Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diampu oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang diampu oleh Sekretariat.

2.4. Instrumen Pendukung Kinerja Barenlitbangda

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan. Dalam hal ini Barenlitbangda Kota Sawahlunto berusaha untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya terutama dalam meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Barenlitbangda Kota Sawahlunto membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Barenlitbangda Kota Sawahlunto sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder. Sistem informasi yang telah dibangun untuk mendukung capaian kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto antara lain :

1. Website Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Barenlitbangda Kota Sawahlunto mempunyai wadah informasi berupa website yang dapat diakses melalui **<http://barenlitbangda.sawahluntokota.go.id>**. Website ini memberikan informasi berupa dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan di Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

2. Layanan Informasi Media Sosial

Selain memberikan informasi melalui website, Barenlitbangda Kota Sawahlunto juga telah memiliki layanan informasi melalui Facebook dan Instagram.

3. Sistem Informasi Perencanaan (Simonev)

Aplikasi Simonev adalah sistem informasi daerah yang merupakan replikasi dari Sakato Plan yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Untuk saat ini Aplikasi Simonev hanya tersedia menu untuk monitoring dan evaluasi sedangkan menu untuk perencanaan, monev capaian IKU dan IKD serta data dan informasi pembangunan daerah masih dalam tahap pengembangan oleh tim Barenlitbangda dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan di Kota Sawahlunto.

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk :

1. Menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. Menganalisis penyebab kegagalan/ keberhasilan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan ditahun berikutnya.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian $\leq 50\%$ (sangat rendah/sangat kurang baik)
2. Capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah/kurang baik)
3. Capaian $66\% \leq 75\%$ (sedang/baik)
4. Capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi/sangat baik)
5. Capaian $91\% \leq 100\%$ (sangat tinggi/memuaskan)

Adapun formula penghitungan indikator kinerja sasaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan :

(60% Capaian Sasaran Pemko + 20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah
+ 20% Capaian Program) x 100%

2. Indikator kinerja Persentase Tingkat Kemanfaatan Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah :

$\frac{\text{Jumlah Penelitian yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Penelitian}} \times 100\%$

3. Indikator kinerja Nilai SAKIP Barenlitbangda :

Hasil penilaian SAKIP Barenlitbangda oleh Inspektorat Kota Sawahlunto

4. Indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah :

Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation
Government Award)

5. Indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Barenlitbangda :

$\frac{\text{Realisasi Anggaran Tahun } n}{\text{Pagu Anggaran Tahun } n} \times 100$

3.2 Hasil Pengukuran kinerja

Barenlitbangda Kota Sawahlunto telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Pada
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	100	95,04	95,04
2.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	100	100	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda	Nilai SAKIP Barenlitbangda	Nilai	BB (70,1)	B (69,61)	99,4
4.	Tercapainya Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	73	66,08	90,5
5.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Barenlitbangda	Persentase Realisasi Anggaran Barenlitbangda	%	97	94,64	97,6

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Barenlitbangda Tahun 2025, data diolah

Tahun 2025 merupakan kinerja tahun kedua Renstra Barenlitbangda Tahun 2024-2026 seiring dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Berikut rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 s/d 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun Ke-								
				2024			2025			2026		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	100	94,89	94,89	100	95,04	95,04	100		
2.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda	Nilai SAKIP Barenlitbangda	Nilai	BB (70,1)	CC (57,51)	82,1	BB (70,1)	B (69,61)	99,4	A (80,1)	-	-
4.	Tercapainya Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	71	72,87	102,6	73	66,08	90,5	73,5	-	-
5.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Barenlitbangda	Persentase Realisasi Anggaran Barenlitbangda	%	95	96,38	101,5	97	94,64	97,6	95	-	-

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Barenlitbangda Tahun 2024 s/d 2026, data diolah

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 diatas, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis :

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja : Indeks Perencanaan Pembangunan Target Kinerja : 100
---------------------	--

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan indikator kinerja ini, dimana Indeks Perencanaan Pembangunan merupakan indikator yang secara umum dipakai oleh Kementerian Bappenas dan Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan diseluruh Indonesia. Adapun metode pengukuran dari indeks perencanaan tersebut ada beberapa metode pengukuran yang pada prinsipnya sama, sehingga Barenlitbangda Kota Sawahlunto memilih metode pengukuran dengan menggunakan defenisi operasional sebagai berikut :

(60% Capaian Sasaran Pemko + 20% Capaian Sasaran PD + 20% Capaian Sasaran Program) x 100%

Berdasarkan capaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun 2025

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	2025	2025	8= 7	9=7/6x100	10=9/5x100	11
1	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	78,29	77,14	77,05	77,05	99,88	98,42	
		Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,6	70,45	74,21	74,21	100	100	
		Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak baita pada waktu yang sama) x 100 %	10,6	12,5	20	20	40,00	11,32	
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	14,75	14,25	13,89	13,89	97,47	94,17	
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	11,65	11,45	10,54	10,54	92,05	90,47	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender	95,79	95,78	belum rilis	0	0,00	0,00	
		Penghargaan kota layak anak (kategori)	Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Kemen PPPA, tim dari Kementerian/Lembaga dan tim independen	KLA	utama	Nindya	Nindya	91,13	81,02	

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%) 2025	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8= 7	9=7/6x100	10=9/5x100	11
		Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat	74,7	74,6		0	0,00		
		Persentase Pelestarian warisan Budaya (%)	(Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/Jumlah warisan budaya) x 100%	78	74	74,2	74,2	100	95,13	
2	Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	86	85,5	72,94	72,94	85,31	84,81	
		Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	72	70,96	66,73	66,73	94,04	92,68	
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak/ total jumlah rumah tangga) x 100 %	98,35	98,01	96,3	96,3	98,26	97,92	
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100 %	88,7	87,3	91,93	91,93	100	100	
		Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	(luas daerah yang dilayani jaringan irigasi/total luas daerah) x 100%	0,71	0,63	0,43	0,43	68,25	60,56	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	67,87	66,34	76,93	76,93	100	100	
		Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	88,32	87,2	63,04	63,04	72,29	71,38	
		Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7	7,05	8,3	8,3	100	100	

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%) 2025	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8= 7	9=7/6x100	10=9/5x100	11
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	87	86	86,08	86,08	100	98,94	
		Persentase tanah pemerintah yang tertib administrasi	Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat/jumlah tanah pemerintah x 100 %	30,6	26,69	47,79	47,79	100	100	
		Indeks Ketahanan daerah	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,56	0,4	0,4	71,43	70,18	
		Rasio Konektivitas kota	(IK1 x bobot angkutan jalan) + IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,64	0,62	0,63	0,63	100	98,44	
		Kinerja lalu lintas	(Volume lalu lintas/kapasitas jalan) x 100 %	68	67		0	0,00	0,00	
3	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dan produk lokal	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	5,12	4,92		0	0,00	0,00	
		Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,28	0,29		0	0,00	0,00	
		PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	71,12	68,62		0	0,00	0,00	
		Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,12	2,13	2,72	2,72	100	100	
		Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	12,62	12,14		0	0,00	0,00	

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%) 2025	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8= 7	9=7/6x100	10=9/5x100	11
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,75	4,83	4,64	4,64	96,07	97,68	
		Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,34	2,3		0	0,00	0,00	
		Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	12,06	11,78		0	0,00	0,00	
		Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,73	14,71		0	0,00	0,00	
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	73,9	73,88		0	0,00	0,00	
		Persentase Kontribusi sektor Pertanian pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	9,08	9,04		0	0,00	0,00	
		Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	27,07	27,03	23,30	23,3	86,20	86,07	
		Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	
		Persentase partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	(Jumlah pemuda yang berwirausaha/jumlah pemuda) x 100%	16,2	14,2		0	0,00	0,00	
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu	54,2	53,87		0	0,00	0,00	

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	2025	2025	8= 7	9=7/6x100	10=9/5x100	11
	yang melayani dan inovatif		Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB							
		Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	66,01	63,01	66,08	66,08	100	100	
		Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	84,84	83,63		0	0,00	0,00	
		Nilai SAKIP	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	63,35	62,77		0	0,00	0,00	
		IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	78	77	70,521	70,521	91,59	90,41	
		Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah %)	(Nilai PAD dibagi dengan total pendapatan)x 100%	12,43	12,35	12,4	12,4	100	100	
		Indeks Ketahanan Nasional	kondisi dinamis bangsa indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung	2,91	2,9	belum rilis	belum rilis	0,00	0,00	
		Persentase Penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus Pelanggaran perda tahun (n-1) -jumlah kasus pelanggaran perda tahun n)/ jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100%	0,02	0,06		0	0,00		
		Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,93	2,78	3,68	3,68	100	100	
		Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kuaifikasi pendidikan, kompetensi,	82	80		0	0,00	0,00	

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%) 2025	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8= 7	9=7/6x100	10=9/5x100	11
			kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya							
Rata-rata capaian IKU									93,61	

Sumber : Bidang Penelitian dan Pengembangan Barenlitbangda Tahun 2025, data diolah

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran tersebut, capaian kinerjanya sebesar **93,61%** dengan kategori sangat tinggi.

Adapun capaian sasaran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	B	60	47,2	47,20	62,93	1
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD/ Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kota Sawahlunto x 100 %	100	100	75,53	75,53	75,53	75,53	1
3	APK PAUD (%)	(Jumlah Siswa PAUD /Jumlah seluruh anak yang berusia 3-6 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	96,12	95,62	75,53	75,53	78,99	78,58	1
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-12 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	Jumlah anak usia7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar sekolah Dasar / anak usia7-12 Kota Sawahlunto	100	100	99,58	99,58	99,58	99,58	1
5	APK SD/MI/Paket A (%)	(Jumlah Siswa SD /Jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	111,4	111,21	99,58	99,58	89,54	89,39	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
6	APK SMP/MTs/Paket B (%)	(Jumlah Siswa SMP /Jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	96,3	95,2	96,94	96,94	100,00	100,66	1
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	(Jumlah Murid SD/ sederajat usia 7-12 tahun /Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	99,9	99,8	91,26	91,26	91,44	91,35	1
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama/ Jumlah anak usia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto x 100 %	100	100	96,94	96,94	96,94	96,94	1
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	(Jumlah Murid SMP/ sederajat usia 13-15 tahun /Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	85,2	84,3	83,54	83,54	99,10	98,05	1
10	Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Capaian kompetensi literasi SD adalah persentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus di kalikan bobot setiap kompetensi	75	2,16=69,39	83,48	83,48	100,00	100,00	1
11	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	capaian kompetensi Numerasi SD adalah presentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	67,67	1,94 = 60,16	80,34	80,34	100,00	100,00	1
12	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	capaian kompetensi Literasi SMP adalah presentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	75,33	2,21 = 74,72	82,18	82,18	100,00	100,00	1
13	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	capaian kompetensi Numerasi SMP adalah presentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	79	2,27 = 75,64	79	79	100,00	100,00	1
14	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP) (%)	Jumlah izin yang dikeluarkan (dibagi) / seluruh usulan yang masuk	100	100	100	100	100,00	100,00	1
15	Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar jumlah	Jumlah satuan pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai standar baik kuantitas	100	100	100	100	0,00	100,00	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
	dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (%)	maupun kualitas disetiap jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah satuan pendidikan							
16	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan (%)	Jumlah Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal dibagi dengan satuan pendidikan yang ada	100	100	17,58	17,58	17,58	17,58	1
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan/ Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kota Sawahlunto x 100 %	100	100	36,45	36,45	36,45	36,45	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
18	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B	BB	BB	100,00	100,00	1
19	Cakupan Layanan Rujukan (%)	Jumlah Pasien Rujukan yang Dilayani / Jumlah Pasien yang Dirujuk ke RSUD Sawahlunto x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
20	Cakupan Layanan Dasar (%)	Jumlah puskesmas yang menjalankan kegiatan UKM dan UKP dibagi dengan jumlah puskesmas dikali 100 %	100	100	100	100	100,00	100,00	1
21	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk x 100 %	0,16	0,16	0,146	0,146	91,25	91,25	1
22	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	Jumlah RS Rujukan tingkat yang terakreditasi/jumlah RS di kab/ Kota Sawahlunto x100 %	100	100	100	100	100,00	100,00	1
23	Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	Jumlah puskesmas terakreditasi / jumlah seluruh puskesmas x 100 %	100	100	100	100	100,00	100,00	1
24	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	Jumlah dokter / dengan jumlah penduduk dikali 1000	0,39	0,39	0,56	0,56	100,00	100,00	1
25	Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya (%)	Jumlah SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya dibagi dengan jumlah tenaga kesehatan seluruhnya x 100	100	100	100	100	100,00	100,00	1
26	Jumlah kasus kematian bayi (kasus)	Jumlah Kematian bayi pada satu tahun tertentu	7	10	9	9	90,00	100,00	1
27	Jumlah Kasus Kematian IBU (kasus)	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	1	1	1	1	100,00	100,00	1
28	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	jumlah Balita Gizi buruk/Jumlah Balita di Kota Sawahlunto x 100	7	7,1	0	0	0,00	0,00	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
29	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan (%)	Jumlah Sarana yang memenuhi standar dan pelayanan perizinan/Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian x 100	90	85	85	85	100,00	94,44	1
30	Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin (%)	Jumlah Sarana pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi standar perizinan/Jumlah Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman x 100	90	85	85	85	100,00	94,44	1
31	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan (%)	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan dibagi dengan jumlah poskesdes dan poskeskel yang ada x 100	100	75	75	75	100,00	75,00	1
32	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan/ Jumlah ibu hamil di Kota Sawahlunto x 100%	100	100	96,21	96,21	96,21	96,21	1
33	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan/Jumlah ibu bersalin di Kota Sawahlunto x 100%	100	100	96,46	96,46	96,46	96,46	1
34	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x 100%	100	100	96,42	96,42	96,42	96,42	1
35	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar/Jumlah balita di Kota Sawahlunto x 100%	100	100	91,44	91,44	91,44	91,44	1
36	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar /Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
37	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar /Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
38	Persentase warganegara usia 60 tahun ke atas mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar/Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
39	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /Jumlah penderita hipertensi di kota sawahlunto x 100%	100	100	94,84	94,84	94,84	94,84	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
40	Persentase penderitaDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah penderita DM di kota sawahlunto x100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
41	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/Jumlah penderita ODGJ di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
42	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar /Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
43	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar/Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota sawahlunto x 100%	100	100	64,43	64,43	64,43	64,43	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
44	Nilai SAKIP Dinas PUPR	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B	BB	BB	100,00	100,00	1
45	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	(luas daerah yang dilayani jaringan irigasi/total luas daerah) x 100	0,71	0,63	0,43	0,43	68,25	60,56	1
46	Presentase sawah yang terairi (%)	Luas sawah yang terairi/luas sawah x 100	54,43	53,13	-	-			
47	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota sawahlunto/Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota sawahlunto x 100%	99,5	99,01	96,3	96,3	97,26	96,78	1
48	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah	92,97	92,25	91,93	91,93	99,65	98,88	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
		dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di kota sawahlunto x 100%							
49	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen	52,45	51,72	45,86	45,8644	88,68	87,44	1
50	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100	100	99,5	96,3	96,3	96,78	96,30	1
51	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	Panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	49,26	48,66	46,34	46,34	95,23	94,07	1
52	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100	82,52	81,9	-	-			
53	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	Jumlah gedung pemerintah kondisi baik/ jumlah gedung pemerintah x 100	87,14	86,89	92,86	92,86	106,87	100,00	1
54	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/jumlah panjang jalan x 100 %	79,27	78,23	56,9	56,9	72,73	71,78	1
55	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	(Panjang Jembatan dalam kondisi mantap dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	95,94	95,21	91,67	91,67133819	96,28	95,55	1
56	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang (%)	(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan Penataan Ruang x 100%	100	100	50	50	50,00	50,00	1
57	Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan (%)	Jumlah bangunan sesuai tata ruang/ jumlah bangunan X 100	55	50	92,86	92,86	100,00	100,00	1
58	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di kota sawahlunto yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis /Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di kota sawahluntox 100%	0,2	1,5	0,24	0,24	16,00	100,00	1
59	Rasio kepatuhan PBG kab/ kota	Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya/Jumlah PBG yang berlaku x 100%	87	86,5	62,84	62,84	72,65	72,23	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
60	Nilai SAKIP Dinas KP2LH	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B	B	B	100,00	100,00	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
61	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sesuai SK Walikota (Ha)	3,08	8	0	0	0,00	0,00	1
62	Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %	85	84	84	84	100,00	98,82	1
63	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni / Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
64	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	Jumlah unit rumah tidak layak huni/Jumlah total unit rumah kabupaten/kota x 100%	1	1,05	8,30	8,304853042	100,00	100,00	1
65	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU/Jumlah unit rumah di kota sawahlunto x 100%	87	86	86,08	86,08247423	100,10	98,95	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
66	Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	B	B	65	100,00	86,67	1
67	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
68	Persentase Penurunan kasus kebakaran (%)	(jumlah kasus kebakaran tahun (n-1) -jumlah kasus kebakaran tahun n)/ jumlah kasus kebakaran tahun (n) x 100%	15,3	13,3	-76,15	-76,15	0,00	0,00	1
69	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	(Jumlah pengaduan yang ditangani/ jumlah pendaguan pelanggaran yang masuk) x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
70	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto (%)	(Jumlah kasus kebakaran yang ditangani/jumlah kasus kebakaran) x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
71	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kota sawahlunto dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah/Jumlah kejadian kebakaran di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
72	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15	15	15	15	100,00	100,00	1
73	Nilai SAKIP BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	65	55	55	84,62	73,33	1
74	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100	100	100,00	100,00	1
75	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100	100	100,00	100,00	1
77	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	100	100,00	100,00	1
78	Indeks Ketahanan daerah	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,56	0,4	0,4	71,43	70,18	1
79	Persentase Penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus Pelanggaran perda tahun (n-1) -jumlah kasus pelanggaran perda tahun n)/ jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100%	0,02	0,06	-52,74	-52,74	100,00	100,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					0			
80	Nilai SAKIP Dinas Sosial PMDesPPA	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B	A (80,04)	A (80,04)	100,00	100,00	1
81	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang	100	100	100	100	100,00	100,00	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
	terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti : populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%							
82	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun anggaran : populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100	100	100	100	100,00	100,00	1
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
83	Nilai SAKIP DPMPSTSPNaker	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	BB	B	65	100,00	86,67	1
84	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	80	75	1,31	1,31	1,75	1,64	1
85	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	PDRB ADHK tahun berjalan / Jumlah tenaga kerja x 100%	97,94	96,25	belum rilis	belum rilis			
86	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
87	Persentase lulusan pelatihan yang berwirausaha (%)	Jumlah lulusan pelatihan yang berwirausaha / Jumlah peserta pelatihan keseluruhan x 100%	9	7	33,9	33,9	100,00	376,67	1
88	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	30	25	52,13	52,13	100,00	173,77	1
89	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja(%)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	30	25	52,13	52,13	100,00	173,77	1
90	Persentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (%)	Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan / Jumlah pekerja pada perusahaan se-Kota Sawahlunto x 100%	100	95	58,32	58,32	61,39	58,32	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
91	Persentase perusahaan yang menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun n / Jumlah perusahaan di wilayah Kota Sawahlunto pada tahun n x 100%	50	45	29	29	64,44	58,00	1
92	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/Jumlah total perusahaan x 100%	90	85	89,47	89,47	100,00	99,41	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
93	Indeks Pemberdayaan gender/ IDG (IKU OPD) (%)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	65,9	65,89	belum rilis	belum rilis			
94	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD : jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100%	7	6	12,36	12,36	100,00	176,57	1
95	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	Jumlah anggota DPRD perempuan/ jumlah total anggota DPRD x 100%	20	20	20	20	100,00	100,00	1
96	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	Jumlah keluarga yang ditingkatkan kualitasnya/ jumlah seluruh keluarga x 100 %	100	100	100	100	100,00	100,00	1
97	Persentase Kelurahan ramah anak (%)	Jumlah kelurahan ramah anak / jumlah seluruh kelurahan x 100 %	100	100	100	100	100,00	100,00	1
98	Persentase sekolah ramah anak (%)	Jumlah sekolah ramah anak/ jumlah seluruh sekolah x 100 %	100	100	100	100	100,00	100,00	1
99	Rasio KDRT (%)	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	0,01	0,01	0,008	0,008	80,00	80,00	1
100	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi/Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
101	Persentase kekerasan terhadap perempuan (%)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan/Jumlah penduduk perempuan x100%	0,01	0,01	0,02	0,02	100,00	100,00	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
102	Nilai SAKIP Dinas KP3	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	BB	A	A	100,00	100,00	1
103	Persentase Kecukupan Kebutuhan Beras (%)	Kebutuhan/Produksi X 100 %	100	100	184	184	100,00	100,00	1
104	Skor PPH	indeks rata-rata konsumsi pangan masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok	87	86,5	90,28	90,28	100,00	100,00	1
105	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	Jumlah penurunan produk rawan pangan/jumlah penduduk rawan pangan x 100%	6	6	9,41	9,41	100,00	100,00	1
106	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	Perbandingan produk pangan segar yang terdeteksi dari cemaran mikroba bagi total bahan pangan yang menjadi sampel	93	93	97,5	97,5	100,00	100,00	1
107	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	Jumlah cadangan pangan/ Jumlah kebutuhan pangan x 100%	179,2	167,7	182,65	182,65	100,00	100,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
108	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani/jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
109	Persentase Dokumen Pertanahan (%)	jumlah dokumen pertanahan yang terlaksana/jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	25	25	0	0	0,00	0,00	1
110	Persentase tanah pemerintah yang tertib administrasi (%)	Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat/jumlah tanah pemerintah x 100 %	30,6	26,69	47,79	47,79	100,00	100,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
111	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5% IKU, 21,9%	66,57	65,52	76,93	76,93	100,00	100,00	1
112	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%)	Total Vol sampah yang dapat ditangani /Total vol timbunan sampah kabupaten/kota x 100%	99	98		0			

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
113	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kota sawahlunto /usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100%	79	78	78	78	100,00	98,73	1
114	Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 %	Jumlah sampel yang memenuhi baku mutu air	58	57,5	77,58	77,58	100,00	133,76	1
115	Indeks Kualitas udara (IKU) 40,5 %	Jumlah sampel yang memenuhi baku mutu udara	87,64	87,54	84,05	84,05	96,01	95,90	1
116	Indeks Kualitas tutupan lahan (IKL) 21,9 %	luas tutupan lahan	48,72	47,72	76,93	76,93	100,00	100,00	1
117	Indeks Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah	68,9	68,66		0	0,00	0,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
118	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Catpil	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B	BB	BB	100,00	100,00	1
119	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 hari yg sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 th x 100%	85	80	76,88	76,88	96,10	90,45	1
120	Perekaman KTP elektronik (%)	Jumlah penduduk berumur 17 th keatas yg memiliki KTP /jumlah penduduk 17 th keatas x 100%	99,9	99,8	97,19	97,19	97,38	97,29	1
121	Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir) (%)	Jumlah anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir /Jumlah anak usia 0-18 th x100%	98,2	98,1	93,5	93,5	95,31	95,21	1
122	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	Jumlah OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama : Jumlah OPD x 100%	100	100	96,3	96,3	96,30	96,30	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
123	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun : Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
124	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang pertahun berdasarkan indeks desa membangun/tahun x 100%	0	0	0	0	0,00	0,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
125	TFR (Total Fertility Rate) Angka Kelahiran Total	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	2,16	2,18		0			
126	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraception Prevalence Rate /MCPR (%)	Jumlah AkseptorAktif Moder/ Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	70	68		0			
127	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100	11,6	12		0			
128	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga (%)	Jumlah semua kelompok ketahanan keluarga yang mendapatkan informasi Bangga /Semua Jumlah Ketahanan Kelompok yang ada x 100	88	87	87	87	100,00	98,86	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
129	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	B	CC	65	0,00	86,67	1
130	Rasio konektivitas kota	(IK1 x bobot angkutan jalan) + IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,56	0,56	0,63	0,63	100,00	100,00	1
131	Kinerja lalu lintas (%)	(Volume lalu lintas/kapasitas jalan) x 100 %	65	65	18,20	18,20	28,00	28,00	1
132	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n- tahun n-1/ jumlah angka kecelakaan tahun n-1 x 100%	70	60	21,88	21,88	36,46	31,25	1
133	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan x 100%	100	75	71,15	71,15	94,87	71,15	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
134	Persentase sarana prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	Jumlah sarana yang tersedia/jumlah sarana yang dibutuhkan X 100%	100	95	100	100	100,00	100,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
135	Nilai SAKIP Dinas Kominfo	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B	BB	BB	100,00	100,00	1
136	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik) x 100 % (Permendagri 18/2020)	80	75	74	74	98,67	92,50	1
137	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota (%)	(jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota/jumlah penduduk) x 100%	100	100	75,29	75,29	75,29	75,29	1
138	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (%)	(jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo/jumlah opd) x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
139	Nilai SAKIP Dinas Koperindag	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B	BB	BB	100,00	100,00	1
140	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ Jumlah seluruh koperasi x 100%	8,9	8,8	16,18	16,18	100,00	100,00	1
141	Persentase koperasi sehat (%)	(jumlah koperasi sehat/total kopoerasi)x100%	29	28	27,94	27,94	99,79	96,34	1
142	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (%)	(Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya/ Total UMKM)x100%	22	20	20,01	20,01	100,05	90,95	1
143	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian (%)	Jumlah koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/jumlah koperasi x 100%	77	77	57,35	57,35	74,48	74,48	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
144	Persentase UMKM yang meningkat volume usahanya (%)	Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya/ Jumlah UMKMx100%	0,7	0,6	0,6	0,6	100,00	85,71	1
145	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya/total koperasi x 100%	66	58	51,47	51,47	88,74	77,98	1
146	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya (%)	Jumlah pengelola koperasi bersertifikat / Total pengelola koperasi x100%	62	56	18,23	18,23	32,55	29,40	1
147	Persentase pengelola UMKM yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya (%)	Jumlah pengelola UMKM bersertifikat / Total UMKM x100%	12	11	10,17	10,17	92,45	84,75	1
148	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha/Jumlah UMKM X 100%	6	5,5	13,62	13,62	100,00	100,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
149	Persentase Kenaikan nilai realisasi investasi (%)	(Jumlah investasi tahun n/ jumlah investasi tahun n-1) di kota sawahlunto/ jumlah investasi tahun n-1 di kota sawahlunto x 100%	9,03	8,83	23,32	23,32	100,00	100,00	1
150	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah realisasi investasi (PMDN dan PMA)	56	51	311,57	311,57	100,00	556,38	1
151	Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	(Jumlah investor tahun n - jumlah investor tahun n-1) / Jumlah investor tahun n-1 x 100%	31	29	32	32	110,34	100,00	1
152	Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP (%)	Jumlah Penerbitan Dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP/ jumlah penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan x 100%	100	100	92,80	92,8	92,80	92,80	1
153	Persentase Peluang Investasi yang telah divalidasi (%)	Jumlah Peluang investasi yang telah divalidasi/ jumlah peluang investasi x 100%	60	50	52,23	52,23	100,00	87,05	1
154	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terakses Publik (%)	Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terakses publik/ jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
155	Nilai SAKIP Dinas Parpورا	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B	BB	BB	100,00	100,00	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
156	Persentase partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (%)	(Jumlah pemuda yang berwirausaha/jumlah pemuda) x 100%	16,2	14,2	3,2	3,2	22,54	19,75	1
157	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota sawahlunto/jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota sawahlunto x 100%	4,27	4,22	4,02	4,02	95,26	94,15	1
158	Jumlah pemuda berprestasi (orang)	Jumlah pemuda yang berprestasi	18	17	22	22	100,00	100,00	1
159	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	Jumlah pemuda berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional	18	17	22	22	100,00	100,00	1
160	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah organisasi kepramukaan yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional/jumlah organisasi kepramukaan x 100%	79	77	42,86	42,86	55,66	54,25	1
161	Jumlah atlit yang berprestasi	Jumlah atlit yang berprestasi	160	155	169	169	100,00	100,00	1
162	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	190	185	152	152	82,16	80,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
163	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah OPD x 100 % (Permendagri 18/2020)	100	100	100	100	100,00	100,00	1
164	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah OPD x 100 % (Permendagri 18/2020)	100	100	100	100	100,00	100,00	1
165	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ketersediaan Data (ada/tidak ada)	Ada	Ada	ada	ada	100,00	100,00	1
166	Ketersediaan Buku "Kota Sawahlunto Dalam Angka"	Ketersediaan Data (ada/tidak ada)	Ada	Ada	ada	ada	100,00	100,00	1
167	Ketersediaan Buku " PDRB Kota Sawahlunto "	Ketersediaan Data (ada/tidak ada)	Ada	Ada	ada	ada	100,00	100,00	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
168	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x 100 % (Permendagri 18/2020)	40	35	49,4	49,4	100,00	100,00	1
169	Persentase titik yang diamankan dibandingkan dengan seluruh titik pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang ditetapkan (%)	Jumlah titik yang diamankan / Jumlah seluruh titik pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang ditetapkan x 100 % (Permendagri 18/2020)	70	65	100	100	100,00	100,00	1
170	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah / Jumlah Total Perangkat Daerah x 100 % (Permendagri 86/2017)	100	100	100	100	100,00	100,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
171	Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B	A (80,79)	A (80,79)	100,00	100,00	1
172	Persentase pelestarian budaya tak benda (%)	(Jumlah Budaya Tak Benda Yang Lestari/ Jumlah Budaya Tak Benda) x 100%	77,2	77	48,46	48,46	62,94	62,77	1
173	Persentase Pemajuan Kebudayaan Yang Lestari (%)	(Jumlah pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/Total jumlah pemajuan kebudayaan) X100%	31,5	31,3	46,98	46,98	100,00	100,00	1
174	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri (Kelompok)	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri	13,9	13,6	25,58	25,58	100,00	100,00	1
175	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah (%)	(Jumlah kelompok masyarakat yang mengetahui sejarah / Jumlah kelompok masyarakat yang ada) X 100%	70	65	0	0	0,00	0,00	1
176	Persentase warisan Budaya Benda yang Lestari (%)	Jumlah warisan Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah warisan budaya benda x 100%	70,8	70,7		0			
177	Persentase cagar Budaya Yang Lestari (%)	(Jumlah cagar budaya yang lestari / Total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) X 100%	67	65		0			
178	Jumlah kunjungan museum (orang)	Jumlah kunjungan museum (orang)	34000	33500		0			
179	Persentase Pelestarian warisan Budaya (%)	(Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/Jumlah warisan budaya) x 100%	78	74		0			

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
180	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B		0			
181	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai survei terhadap 5% penduduk usia 15-69 tahun	51,4	51,2		0			
182	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat	74,7	74,6		0			
183	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	(Jumlah Pengunjung Tahun n - jumlah pengunjung tahun n-1)*100%/Jumlah Pengunjung Tahun n-1	2	2		0			
184	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat (%)	Hasil survey terhadap 5% penduduk usia 15 s/d 69 tahun	52,4	52,2		0			
185	Persentase perpustakaan aktif (%)	Jumlah pustaka aktif/ jumlah total pustaka x 100%	90	85		0			
186	Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)	Jumlah naskah yang dinyatakan sebagai naskah kuno	1	1		0			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
187	Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Kota (ANRI)	Nilai Pengawasan kearsipan kab/kota	B	CC	0	0			
188	Tingkat ketersediaan arsip sbg bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah & pertanggungjawaban nasional (pasal 40 & pasal 59 UU no 43/2009 ttg kearsipan) (%)	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan & penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD Prov yg digabung dan/atau dibubarkan & pemekaran daerah kab/kota dg NSPK, a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis & arsip hasil alih media dengan NSPK, c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan	50,60	50,58	0	0			

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
		NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yg bersifat tertutup dg NSPK							
189	Tingkat keberadaan & keutuhan arsip sbg bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa & bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat (%)	$T=(a+i+s+j)/4$ T = tingkat kearsipan, a = % arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip, i = % arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, s = % arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = % jumlah arsip	50,60	50,56		0			
190	Persentase arsip yang diberi akses (%)	(Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan / Jumlah Arsip Yang diakses) * 100%	300 Lembar	250 Lembar		0			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
191	Produksi Ikan (ton)	Jumlah produksi perairan umum dan budidaya	204	202	231,41	231,41	100,00	100,00	1
192	Tingkat Konsumsi Ikan (%)	Jumlah kg ikan yang dikonsumsi masyarakat indonesia selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan segar	39	39	44,97	44,97	100,00	100,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
193	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) /Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%	5,76	4,82	424,79	424,79	100,00	100,00	1
194	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota sawahlunto	(Jumlah wisatawan tahun n –Jumlah wisatawan tahun n-1)/Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%	66	64	182,08	182,08	100,00	100,00	1
195	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual/Jumlah kamar yang tersedia x 100%	17,5	17	16,89	16,89	99,35	96,51	1
196	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,34	2,3		0			
197	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,35	4	2,87	2,87	71,75	65,98	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
198	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (%)	Jumlah Industri Pariwisata yang berdaya saing (sudah memenuhi syarat)/ Jumlah total industri Pariwisata x 100%	5	4	3,7	3,7	92,50	74,00	1
199	Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)	Jumlah produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI/jumlah total ekonomi kreatif x 100%	3	2	15,17	15,17	100,00	100,00	1
200	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang profesional/Jumlah total pelaku ekonomi kreatif x 100%	30	25	4,14	4,14	16,56	13,80	1
201	jumlah wisatawan (orang)	Jumlah wisatawan yang dihitung berdasarkan tiket masuk objek wisata	160000	150000	533392	533392	100,00	100,00	1
202	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	Jumlah pengunjung yang mengatakan puas/jumlah seluruh pengunjung x 100%	80	75	88	88	100,00	100,00	1
203	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	Jumlah Objek wisata unggul/jumlah objek total jumlah wisata x 100%	60	55	60	60	100,00	100,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					0			
204	Jumlah Produksi Padi (Ton)	Produktivitas x luas panen	15.900	15.850	14832,95	14832,95	93,58	93,29	1
205	Jumlah Produksi Karet (Ton)	Produktivitas x luas panen TM	1.740	1.735	2401,81	2401,81	100,00	100,00	1
206	Jumlah Produksi Kakao (Ton)	Produktivitas x luas panen TM	571	570	592,67	592,67	100,00	100,00	1
207	Produksi Daging Sapi (Ton)	Pemotongan tercatat + 5% (pemotongan tercatat) x 173,5	321	320	413,28	413,28	100,00	100,00	1
208	Produksi Daging Ayam (Ton)	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	900,26	900,26	887,41	887,41	98,57	98,57	1
209	Produksi Telur (Ton)	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	135,86	135,86	408,12	408,12	100,00	100,00	1
210	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	Luas serangan OPT/ Luas tanaman	01:10	01:10	01:17	0,053472222	100,00	100,00	1
211	Jumlah Ketenagaan Penyuluh yang berprestasi (orang)	Jumlah penyuluh yang memperoleh prestasi di tingkat prov/nasional	1	1	2	2	100,00	100,00	1
212	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)/ Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%	10	10	1550	1550	100,00	100,00	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
213	Persentase peningkatan usaha perdagangan (%)	Jml pasar yang beroperasi setiap hari/ Total x 100 %	100	100	100	100	100,00	100,00	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
214	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	Jumlah pasar rakyat dengan minimal tipe C / jumlah pasar x 100%	14	14	57,14	57,14	100,00	100,00	1
215	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)	Jumlah bahan pokok yang stabil/Total kebutuhan bahan pokok x 100%	247506	242653	238000	238000	98,08	96,16	1
216	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	Jumlah produk unggulan yang diekspor/Jumlah Produk unggulan x 100%	50	50	57,14	57,14	100,00	100,00	1
217	Persentase pasar tradisional tertib ukur (%)	Jumlah pasar tradisional tertib ukur/ jumlah pasar tradisional x 100%	42	28	14	14	50,00	33,33	1
218	Persentase produk dalam negeri yang dipromosikan (%)	Jumlah produk dalam negeri dipromosikan/Total Produk dalam negeri x100%	65	60	61,54	61,54	100,00	94,68	1
219	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan/Jumlah pelaku usaha diwilayah Kab/Kota x 100%	18	15	41,18	41,18	100,00	100,00	1
220	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	Realisasi/ RDKK x 100%	83	82	53,27	53,27	64,96	64,18	1
221	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan/jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang diwilayah kabupaten/kota x 100%	73	70	2,62	2,62	3,74	3,59	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
222	Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu (IKM)	Jml produk IKM yang memiliki sertifikat halal, AKG tahun ini - tahun sebelumnya	5	5	6	6	100,00	100,00	1
223	Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri (IKM)	Jml IKM yang memanfaatkan teknologi industri tahun ini - tahun sebelumnya	60	50	55	55	110,00	91,67	1
224	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	Jumlah IKM yang meningkat skala usahanya/ Total IKM x100%	2	2	2	2	100,00	100,00	1
225	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai izin (%)	Jumlah Industri kecil menengah yang mempunyai izin/jumlah industri kecil dan menengah x 100%	45	40	50	50	100,00	100,00	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
226	Persentase IKM yang terpublis di SIINAS(%)	Jumlah IKM yang terpublis di SIINAS /jumlah IKM X 100%	45	40		0			
227		Jumlah data IKM yang diperbaharui dalam Sinas	200	200	224	224	100,00	100,00	1
III	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	SEKRETARIAT DAERAH								
228	Nilai SAKIP SETDAKO	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	65	59,42	59,42	91,42	79,23	1
229	Rasio Hafiz Qur'an terhadap santri rumah/pondok tahfiz (%)	(jumlah hafiz alquran/jumlah santri rumah hafiz x 100%	70	65	68,47	68,47	100,00	97,81	1
230	Persentase Peningkatan Zakat di Kota Sawahlunto (%)	(jumlah zakat tahun n - jumlah zakat tahun n-1)/jumlah zakat tahun n-1	6,78	6,54	-0,52	-0,52	0,00	0,00	1
231	Persentase Bantuan Hukum Yang Difasilitasi (%)	(jumlah bantuan hukum yang difasilitasi/jumlah permohonan bantuan hukum yang masuk)x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
232	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	(Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti/jumlah kerjasama yang direncanakan) x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
233	Jumlah Zakat yang Berkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto (Milyar)	jumlah zakat yang terkumpul pada tahun n pada BAZNAS Kota Sawahlunto	6,58	6,17	2,8	2,8	45,38	42,55	1
234	nilai kinerja Pemerintah dalam penerapan SPM	Penilaian kinerja Pemerintah daerah oleh Kementerian dalam negeri RI	94,65	94,6	76,07	76,07	80,41	80,37	1
235	Nilai Kinerja pemerintah berdasarkan hukum dan HAM (predikat)	Penilaian kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian Hukum dan HAM RI	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	100,00	100,00	1
236	Laju Inflasi (%)		< 3,5	< 3,5	0,77	0,77	100,00	100,00	1
	SEKRETARIAT DPRD					0			
237	Nilai SAKIP Sekretariat Dewan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	B	CC	55	0,00	73,33	1
238	Jumlah perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan (%)	Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %	100	100	100	100	100,00	100,00	1
	PERENCANAAN								
239	Nilai SAKIP Barenlitbangda	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	85	BB	B	65	0,00	76,47	1
240	Indeks Perencanaan Pembangunan	60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100%	100	100		0			

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
241	Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD ke dalam RKPD (%)	Jumlah Program pada RKPD/ Jumlah Program pada RPJMD x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
242	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	Jumlah Capaian Program/ Jumlah Target Program yang ada x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
243	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Mitra (%)	60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100% (BIDANG MITRA)	100	100		0			
	KEUANGAN								
244	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	B	B	65	100,00	86,67	1
245	Opini Laporan Keuangan	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	1
246	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Penilaian terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	78	77	70,5213	70,5213	91,59	90,41	1
247	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar aset tetap?	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	1
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	1
		3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	1
		4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	1
248	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	(Nilai PAD dibagi dengan total pendapatan)x 100%	12,43	12,35	12,4	12,4	100,40	99,76	1
249	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA/total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100%	0,6	0,65	9		100,00	0,00	1
	KEPEGAWAIAN					0			
250	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	B	B	65	100,00	86,67	1
251	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	Ukuran Kepuasan terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	100		100	100	0,00	100,00	1
252	Pemenuhan Penataan ASN (NSPK) Pemerintah Kota Sawahlunto	Nilai NSPK BKN	85	80	N/A	N/A			
253	Indeks Merit Sistem ASN	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah (Penilaian dari KPK)	170	165	N/A	N/A			

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
254	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah	3	2,95	5,12	5,12	100,00	170,67	1
255	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,4	0,4	0,24	0,24	60,00	60,00	1
256	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,26	0,25	0,23	0,23	92,00	88,46	1
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
257	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan (%)	(Jumlah Penelitian yang Ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Penelitian) x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
258	Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%)	Jumlah data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan/perencanaan pembangunan/jumlah total data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
	INSPEKTORAT DAERAH								
259	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B		0			
260	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3			0			
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 4	Level 4		0			
261	Persentase PD yang mendapat Nilai SAKIP BB	Persentase PD yang mendapat Nilai SAKIP BB	100	100		0			
262	Persentase pengawasan terlaksana sesuai PKPT (%)	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan / Jumlah Rencana Pengawasan di PKPT x 100	100	100		0			
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
263	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda/ Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda x 100%	70	65		0			
264	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda/total jumlah dokumen yang telah dirinci x 100%	90	85		0			
	PENGADAAN								
265	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	(Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif/jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif) x100%	67	66	100	100	100,00	100,00	1
266	Persentase jumlah total proyek kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	(jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam tiga kuartal yang ditandatangani pada kuartal prtama tahun n/ jumlah kontrak keseluruhan tahun n) x 100%	0		0	0	0,00	0,00	1
267	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	(Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan/total belanja langsung) x 100%	0,37	0,36	0,413	0,413	100,00	100,00	1
	UNSUR KEWILAYAHAN								
268	Nilai SAKIP Kecamatan Talawi	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	B	B	65	100,00	86,67	1
269	Nilai SAKIP Kecamatan Barangin	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	B	B	65	100,00	86,67	1
270	Nilai SAKIP Kecamatan Silungkang	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	B	CC	55	0,00	73,33	1
271	Nilai SAKIP Kecamatan Lembah Segar	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	B	C	40	0,00	53,33	1
272	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	(Jumlah LPM,PKK, RT/RW yang Aktif/Jumlah Total LPM,PKK, RT/RW) x 100 %	100	100	100	100	100,00	100,00	1
	PEMERINTAHAN UMUM								
273	Nilai SAKIP Badan Kesbang	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75	B	CC	55	0,00	73,33	1
274	Persentase potensi konflik yang dapat teredam (%)	Jumlah potensi konflik yang dapat teredam /jumlah potensi konflik x 100%	100	100	100	100	0,00	100,00	1
275	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)	Jumlah Peserta yang meningkat pemahamannya/jumlah peserta x 100%	65	60	60	60	100,00	92,31	1
276	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pemilu/Jumlah DPT x 100%	86,25	86,25	86,25	86,25	100,00	100,00	1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)			Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2025)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2025) (%)	Keterangan
				2025	2025		2025		
1	2	3	4	5	6	7=8	9=6/5x100	10=7/4x100	14
277	Tingkat partisipasi memilih pada pemilihan kepala daerah (%)	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pilkada/Jumlah DPT x 100%	82,5	82,5	82,5	82,5	100,00	100,00	1
278	Tingkat partisipasi memilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (%)	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pilgub/Jumlah DPT x 100%	65,8	65,8	65,8	65,8	100,00	100,00	1
279	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif di Kota Sawahlunto (%)	Jumlah organisasi yang terdaftar dan aktif/jumlah organisasi yang terdata x 100%	100	100	100	100	100,00	100,00	1
280	Persentase Fasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama (%)	Pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100	100	100	100	100,00	100,00	1
281	Indeks Ketahanan Nasional	kondisi dinamis bangsa indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung	2,91	2,9	belum rilis	belum rilis			
Rata-rata capaian								95,42	

Sumber : Bidang Penelitian dan Pengembangan Barenlitbangda Tahun 2025, data diolah

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) indikator kinerja sasaran tersebut, capaian kinerjanya sebesar **95,42%** dengan kategori sangat tinggi.

Adapun capaian kinerja sasaran program Tahun 2025 masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Program
Tahun 2025

	NAMA PERANGKAT DAERAH	PAGU PERUBAHAN RKPD (Rp)	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA RKPD (%)	REALISASI ANGGARAN	
				Rp	(%)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.338.719.456	100	33.630.302.065	90,07
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	16.638.930.926	84,21	15.802.285.709	94,97
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.389.799.890	97,67	10.509.613.799	101,15
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.753.264.302	100,00	4.220.764.627	88,80
5	Dinas Perhubungan	9.284.326.853	84,77	12.729.569.545	137,11
6	Kec. Lembah Segar	9.122.408.437	100	8.685.123.086	95,21
7	Kec. Barangin	7.457.616.328	100	6.894.681.911	92,45
8	Kec. Silungkang	2.455.387.063	100	2.237.861.276	91,14
9	Kec. Talawi	2.383.724.468	100	2.123.503.188	89,08
10	Sekretariat DPRD	23.871.617.350	100	5.470.029.369,0	106,70
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	15.491.897.271	99,9	14.286.891.076	92,22
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	8.576.667.300	85,56	8.674.993.665	101,15
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.748.407.076	97,65	5.358.961.155	93,23
14	Dinas Kebudayaan	7.226.511.522	75,32	6.332.122.118	87,62
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	10.784.234.439	83,2	10.663.761.037	98,88
16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.515.179.977	99	5.909.739.551	90,71
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	84.276.126.192	77,65	69.672.267.590	82,67

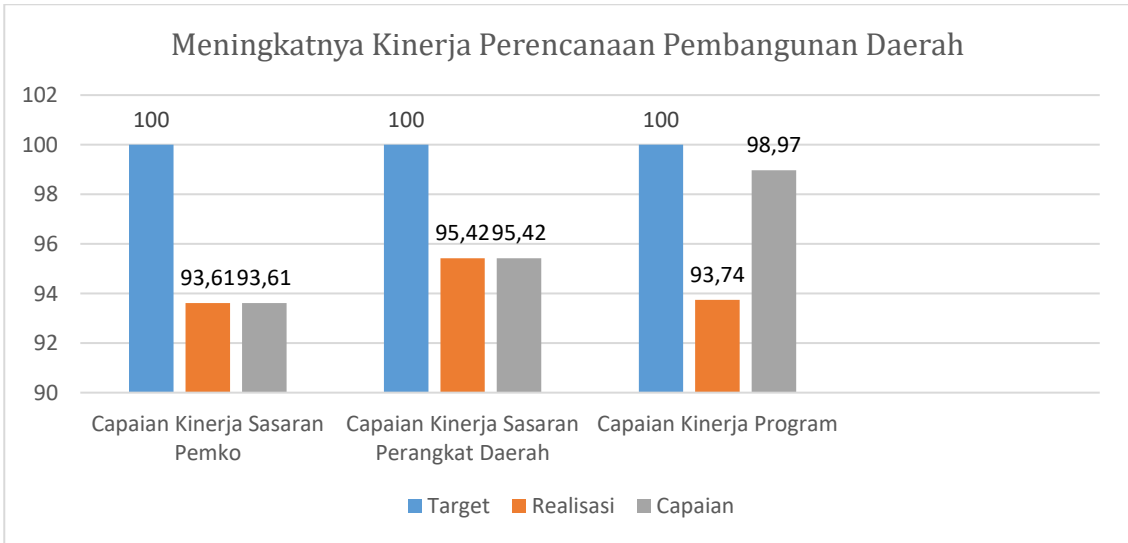
	NAMA PERANGKAT DAERAH	PAGU PERUBAHAN RKPD (Rp)	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA RKPD (%)	REALISASI ANGGARAN	
				Rp	(%)
18	Sekretariat Daerah	34.056.747.250	89,5	32.006.442.759	93,98
19	Dinas Kominfo	5.532.885.047	69,59	5.306.000.317	95,90
20	Dinas Pendidikan	124.001.596.745	83,87	115.958.988.563	93,51
21	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	141.470.605.030	86,29	135.369.003.206	95,69
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	8.753.053.065	92,3	8.020.957.639	91,64
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.228.992.858	81,4	3.860.942.358	91,30
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.181.934.627	0	4.424.575.857	85,38
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.165.194.735	89,16	4.441.223.419	85,98
26	Inspektorat	9.587.767.137	87,63	7.315.368.844	76,30
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.775.992.022	92,11	4.213.712.715	88,23
TOTAL		605.069.587.366	98,97	564.119.686.444	98,97

Sumber : Bidang Penelitian dan Pengembangan Barenlitbangda Tahun 2025, data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) Perangkat Daerah yang ada di Kota Sawahlunto rata-rata capaian kinerja program sebesar **98,97%** dengan kategori sangat tinggi.

Adapun capaian dari masing-masing indikator dalam penghitungan Indeks Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1
Sasaran 1



Sumber : Bidang Penelitian dan Pengembangan Barenlitbangda Tahun 2024, data diolah

Berdasarkan data dan uraian dari tabel 3.3 sampai dengan tabel 3.5 diatas, maka dapat dihitung Indeks Perencanaan Pembangunan Kota Sawahlunto sebagai berikut :

= (60% capaian sasaran pemko + 20% capaian sasara perangkat daerah + 20% capaian sasaran program) x 100
= ((0,6 x 93,61)+(0,2 x 95,42)+(0,2 x 98,97) x 100%
= (56,17 + 19,08 + 19,79) x 100%
= **95, 04**

Tabel 3.6
Perbandingan Indeks Perencanaan Pembangunan

No.	Provinsi/Kab/Kota	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan	Predikat	Ket
1.	Prov. Sumatera Barat	95,27	Sangat Tinggi	
2.	Sawahlunto	95,04	Sangat Tinggi	
3.	Padang Pariaman	82,38	Sangat Tinggi	
4.	Sijunjung	89,98	Sangat Tinggi	

Untuk mencapai sasaran 1 (satu) Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah, Barenlitbangda Kota Sawahlunto melaksanakan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebesar Rp. 384.353.180,-. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dan efektif mencapai sasaran tersebut. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1 (satu) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1

No.	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	6	384.353.180	241.074.314
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	292.384.350	152.152.080
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	91.968.830	88.922.234

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator sasaran 1 (satu) diatas dapat dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumus :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 384.353.180,- terealisasi sebesar Rp. 241.074.314,- atau 62,7%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 143.278.866,- atau 37,3%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran, diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 95,04% lebih tinggi dari realisasi anggaran sebesar 62,7%, sehingga tingkat efisiensi sebesar 32,34%.

Analisis faktor penghambat/ kendala dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Target indikator kinerja terlalu tinggi
- b. Adanya perubahan regulasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- c. Kurangnya keseriusan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan.
- d. Belum optimalnya sistim pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga masih banyak perangkat daerah belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan.
- e. Adanya pembatasan anggaran sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Nomor : 900.1.3.5/376/Perben-Swl/2025 tanggal 8 September 2025 perihal Efisiensi Belanja APBD 2025.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Mengkoordinir Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Menjaga keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan, sehingga seluruh anggaran yang digunakan dapat efektif dalam pencapaian kinerja.
- c. Menetapkan program-program unggulan yang menjadi prioritas.
- d. Melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi data perencanaan dan penganggaran guna menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

- e. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2026

- a. Mendorong dan memastikan perangkat daerah untuk menyusun dokumen perencanaan (tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja) yang sesuai dan selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
- b. Optimalisasi verifikasi penyusunan renja perangkat daerah.
- c. Lebih mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
- d. Bekerjasama dengan BPS melalui forum data, guna perumusan beberapa indikator kinerja (IKU dan IKD).
- e. Menjaga kualitas indikator sasaran kinerja Barenlitbangda dengan menyamakan persepsi dengan semua bidang, sehingga rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan disusun lebih berfokus pada pencapaian tujuan organisasi.

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah Indikator Kinerja : Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah Target Kinerja : 100%
-----------------------------------	--

Untuk indikator kinerja Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus/ definisi operasional sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penelitian yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Penelitian}} \times 100\%$$

Dalam rangka pelaksanaan urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025, Barenlitbangda Kota Sawahlunto telah melaksanakan analisa terhadap 3 (tiga) kajian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menilai sampai sejauh mana manfaat kajian tersebut untuk pencapaian tujuan pembangunan Kota Sawahlunto. Adapun analisa untuk masing-masing kajian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Kota Sawahlunto

Kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan program dari Bappenas bekerja sama dengan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) yang dilaksanakan

oleh DALA Institute. Hasil dari penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah program/kegiatan alam menerapkan Pembangunan Rendah Karbon di Kota Sawahlunto dan telah mendapat masukan dari stake holder di Kota Sawahlunto. Beberapa rekomendasi penting juga telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029. Untuk selanjutnya, Rencana Pembangunan Rendah Karbon ini perlu ditetapkan legal formalnya setidaknya dalam Peraturan Wali Kota, sehingga dapat menjadi acuan bersama dalam penerapannya.

2. Fasilitasi Rencana Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Kajian PLTS dan PLTA ini diinisiasi oleh Bank Dunia dan sudah dilaksanakan beberapa kali pertemuan dengan Tim Bank Dunia yang juga bekerja sama dengan PT. BA dan PT. PLN yang merupakan bagian dari Program “Indonesia Renewable Energi Scale-Up and Economic Diversification”, namun progresnya masih pada tahap penjajakan dalam menentukan lokasi yang tepat.

3. Kajian Terhadap Inovasi-Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri, Barenlitbangda perlu melakukan telaahan terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah serta memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan data-data inovasi yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kematangan inovasi-inovasi yang dilaporkan. Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah ternyata banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat dan individu terutama dalam peningkatan pelayanan publik, daya saing daerah dan pemberdayaan peran serta masyarakat sehingga membantu pemerintah menghadapi tantangan dan perubahan dimasa depan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berdasarkan analisa terhadap ketiga kajian diatas, dimana target kajian yang di analisa sebanyak 3 (tiga) kajian dan terlaksana 3 (tiga) analisa kajian, maka realisasi capaian kinerja sasaran 2 sebesar 100% dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} &= \frac{3}{3} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari ke tiga kajian yang telah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa **100%** kajian tersebut sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran 2 (dua) Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah, Barenlitbangda Kota Sawahlunto melaksanakan 1 (1) program dan 1 (satu) kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebesar Rp. 34.114.200,-. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dan efektif dalam mencapai sasaran tersebut. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 2 (dua) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2

No.	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	34.114.200	2.617.507
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	1	34.114.200	2.617.507

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator sasaran 2 (dua) diatas dapat dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumus :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 34.114.200,- terealisasi sebesar Rp. 2.617.507,- atau 7,67%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 31.496.693,- atau 92,37%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran, diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 100% lebih tinggi dari realisasi anggaran sebesar 7,67%, sehingga tingkat efisiensi sebesar 92,37%.

Analisis faktor penghambat/ kendala dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Belum adanya fungsional peneliti di Barenlitbangda.
- b. Belum semua perangkat daerah, desa dan kelurahan memiliki inovasi.
- c. Belum seriusnya perangkat daerah, desa dan kelurahan dalam melakukan inovasi.
- d. Belum adanya reward dan punishment kepada perangkat daerah yang belum memiliki dan menerapkan inovasi.

- e. Adanya pembatasan anggaran sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Nomor : 900.1.3.5/376/Perben-Swl/2025 tanggal 8 September 2025 perihal Efisiensi Belanja APBD 2025

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi tentang inovasi daerah dengan perangkat daerah, desa dan kelurahan.
- b. Melakukan pendampingan yang terus menerus kepada perangkat daerah, desa dan kelurahan dalam penyusunan inovasi daerah.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2026

- a. Melakukan sosialisasi tentang Inovasi Daerah dengan mendatangkan nara sumber dari BRIN.
- b. Mendorong dan memastikan perangkat daerah untuk menyusun dokumen inovasi daerah yang sesuai dengan kaidah dan regulasi yang ada.
- c. Menjaga inovasi-inovasi yang telah ada untuk dapat dimanfaatkan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Mendorong perangkat daerah untuk terus membuat terobosan-terobosan baru dalam berinovasi.
- e. Memberikan reward kepada perangkat daerah yang memiliki nilai inovasi tertinggi.

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Barenlitbangda Target : BB (70,01)
----------------------------	---

Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda merupakan cerminan kinerja internal Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang bersih, akuntabel dan profesional yang di ukur melalui indikator kinerja nilai SAKIP Barenlitbangda. Adapun capaian nilai SAKIP Barenlitbangda Tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat Kota Sawahlunto sebesar 69,61 dengan prediket "B". Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto sudah mulai menunjukkan ke arah yang lebih baik, karena adanya komitmen seluruh ASN Barenlitbangda dalam pencapaian kinerja, baik individu maupun organisasi.

Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya OPD perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini :

Tabel 3.9
Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Barenlitbangda Kota Sawahlunto

No.	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,97	24,31
2.	Pengukuran Kinerja	30	13,02	17,07
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,94	11,37
4.	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	10,58	16,86
	Tingkat Hasil Evaluasi		57,51	69,61
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B

Sumber : LHE AKIP Barenlitbangda Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi AKIP Barenlitbangda yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto terjadi peningkatan hasil penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja sebesar 1,34, pengukuran kinerja sebesar 4,05, pelaporan kinerja sebesar 0,43 dan evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 6,28. Peningkatan nilai masing-masing komponen tersebut memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan nilai AKIP Barenlitbangda Kota Sawahlunto, dimana nilai AKIP Barenlitbangda Tahun 2024 sebesar 57,51 dengan predikat C, sedangkan nilai AKIP Barenlitbangda Tahun 2025 naik signifikan menjadi 69,61 dengan predikat B, sehingga capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 121%. Namun demikian, pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Barenlitbangda masih perlu menjadi perhatian oleh seluruh ASN Barenlitbangda guna lebih mengefektif dan mengefisienkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk mencapai sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda, Barenlitbangda Kota Sawahlunto melaksanakan 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebesar Rp. 5.825.852.913,-. Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran tersebut. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 3 (tiga) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3

No.	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda	6	5.825.852.913	5.653.147.730
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	5.825.852.913	5.653.147.7302

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator sasaran 1 (satu) diatas dapat dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumus :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 5.825.852.913,- terealisasi sebesar Rp. 5.653.147.730,- atau 97,04%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 172.705.183,- atau 2,96%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran, diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda sebesar 121% lebih tinggi dari realisasi anggaran sebesar 97,04%, sehingga tingkat efisiensi sebesar 23,96%.

Analisis faktor penghambat/ kendala dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Dialog kinerja belum optimal dilaksanakan.
- b. Belum semua pegawai memahami apa itu AKIP.
- c. Belum semua pegawai merumuskan dan menetapkan rencana aksi untuk pemantauan capaian kinerja secara berkala dan berjenjang.
- d. Pihak-pihak yang menandatangani perjanjian kinerja belum sepenuhnya melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala.
- e. Belum adanya aplikasi monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja dilingkungan Barenlitbangda.

- b. Membuat rencana aksi yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja.
- c. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi realisasi kinerja sasaran Renstra serta realisasi fisik dan keuangan secara berkala.
- d. Menyusun aplikasi pengendalian dan evaluasi pelaporan kinerja dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2026

- a. Memastikan komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja diseluruh jajaran dimulai dari eselon 2 sampai dengan staf.
- b. Memastikan semua bidang dan sekretariat untuk membuat rencana aksi.
- c. Melakukan dialog kinerja secara terus menerus.
- d. Meningkatkan kualitas kinerja ASN sampai ke level individu.
- e. Memastikan seluruh ASN membuat dan melaporkan kinerjanya secara berkala.
- f. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala yang dipimpin langsung oleh kepala badan.
- g. Penerapan manajemen talenta dan sistem merit untuk peningkatan nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi melalui kerjasama Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran Strategis 4	Tercapainya Peningkatan Inovasi Daerah Indikator Kinerja : Indeks Inovasi Daerah Target : 73
---------------------	--

Untuk indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah ini di dapat berdasarkan **Standar Penilaian Kemendagri Atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award).**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaporkan inovasi daerah. Pemerintah Kota Sawahlunto menuntut seluruh Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa untuk melaksanakan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat. Inovasi yang telah dibuat, kemudian dilaporkan ke Kemendagri melalui website <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>. Pada Tahun 2025 jumlah inovasi yang telah dilaporkan ke Kemendagri sebanyak 121 inovasi yang berasal dari 20 Perangkat Daerah.

Adapun skor Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 berdasarkan penilaian Kemendagri adalah **66,08**, dimana hasil ini jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu 73. Untuk lebih jelasnya capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Inovasi Daerah	71	72,87	102,64	73	66,08	90,5

Sumber : SK Indeks Inovasi Daerah Kemendagri Tahun 2024 dan 2025

Adapun hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2024 dan 2025 di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Indeks Inovasi Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Pemerintah Daerah	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Skor Indeks	Predikat	Skor Indeks	Predikat
1.	Prov. Sumbar	88,92	Sangat Inovatif	86,96	Sangat Inovatif
	Kabupaten				
1.	Padang Pariaman	85,73	Sangat Inovatif	82,48	Sangat Inovatif
2.	Pesisir Selatan	59,26	Inovatif	56,75	Inovatif
3.	Dharmasraya	63,12	Sangat Inovatif	66,80	Sangat Inovatif
4.	Pasaman Barat	60,36	Sangat Inovatif	60,17	Inovatif
5.	Pasaman	59,35	Inovatif	58,91	Inovatif
6.	Sijunjung	58,96	Inovatif	48,45	Inovatif
7.	Solok Selatan	53,81	Inovatif	49,86	Inovatif
8.	Solok	41,35	Inovatif	49,61	Inovatif
9.	Tanah Datar	45,95	Inovatif	43,17	Inovatif
10.	Agam	50,22	Inovatif	55,23	Inovatif
11.	Lima Puluh Kota	45,72	Inovatif	48,34	Inovatif
12.	Mentawai	-	-	47,21	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Skor Indeks	Predikat	Skor Indeks	Predikat
	Kota				
1.	Sawahlunto	72,87	Sangat Inovatif	66,08	Sangat Inovatif
2.	Pariaman	61,28	Sangat Inovatif	63,50	Inovatif
3.	Padang Panjang	81,35	Sangat Inovatif	87,94	Sangat Inovatif
4.	Padang	63,72	Sangat Inovatif	67,64	Sangat Inovatif
5.	Solok	63,30	Sangat Inovatif	63,17	Inovatif
6.	Bukittinggi	48,99	Inovatif	53,58	Inovatif
7.	Payakumbuh	54,62	Inovatif	51,50	Inovatif

Sumber : SK Indeks Inovasi Daerah Kemendagri Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 mengalami penurunan dari Tahun 2024, dimana skornya turun dari 72,87 menjadi 66,08 tetapi predikat masih sangat inovatif dan berada pada posisi 5 (lima) tingkat Provinsi Sumatera Barat. Penurunan ini menunjukkan bahwa mulai berkurangnya keseriusan Perangkat-Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto dalam melakukan inovasi-inovasi dalam peningkatan kinerja pelayanannya.

Untuk mencapai sasaran 4 (empat) Tercapainya Peningkatan Inovasi Daerah, Barenlitbangda Kota Sawahlunto melaksanakan 1 (1) program dan 1 (satu) kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebesar Rp. 34.114.200,-. Pelaksanaan program dan kegiatan belum efektif dan efisien dalam mencapai sasaran tersebut. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4 (empat) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4

No.	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	34.114.200	2.617.507
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	1	34.114.200	2.617.507

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator sasaran 4 (empat) diatas dapat dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumus :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 34.114.200,- terealisasi sebesar Rp. 2.617.507,- atau 7,67%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 31.496.693,- atau 92,33%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran, diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Tercapainya Peningkatan Inovasi Daerah sebesar 90,5% lebih tinggi dari realisasi anggaran sebesar 7,67%, sehingga tingkat efisiensi sebesar 82,83%.

Analisis faktor penghambat/ kendala dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Tidak disetujuinya Telaahan Staf pelaksanaan penilaian dan reward untuk inovasi perangkat daerah
- b. Belum semua perangkat daerah, desa dan kelurahan memiliki inovasi.
- c. Belum seriusnya perangkat daerah, desa dan kelurahan dalam melakukan inovasi.
- d. Belum maksimalnya jejaring inovasi melalui desa dan kelurahan.
- e. Tidak adanya reward dan punishment kepada perangkat daerah yang belum memiliki dan menerapkan inovasi.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi tentang inovasi daerah dengan mendatangkan nara sumber dari BRIN.
- b. Melakukan pendampingan yang terus menerus kepada perangkat daerah, desa dan kelurahan dalam penyusunan inovasi daerah.
- c. Memberikan reward kepada Perangkat Daerah yang memiliki inovasi terbaik.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2025

- a. Mendorong dan memastikan perangkat daerah untuk menyusun dokumen inovasi daerah yang sesuai dengan kaidah dan regulasi yang ada.
- b. Menjaga inovasi-inovasi yang telah ada untuk dapat dimanfaatkan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- c. Mendorong Perangkat Daerah untuk terus membuat terobosan-terobosan baru dalam berinovasi.

Sasaran Strategis 5	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Barenlitbangda Indikator Kinerja : Persentase Realisasi Anggaran Barenlitbangda Target : 95
---------------------	---

Untuk indikator Persentase Realisasi Keuangan Barenlitbangda, dapat dihitung dengan menggunakan rumus/ definisi operasional sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Tahun n}}{\text{Pagu Anggaran Tahun n}} \times 100$$

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan bulan Desember 2025, dimana pagu anggaran Barenlitbangda sebesar Rp. 6.244.320.293,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.909.739.551,-, sehingga dapat disimpulkan bahwa Persentase Realisasi Keuangan Barenlitbangda sebesar **94,64%** dengan perhitungan :

$$= \frac{5.909.739.551}{6.244.320.293} \times 100\%$$

$$= 94,64\%$$

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator sasaran 5 (lima) diatas dapat dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumus :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 5.825.852.913,- terealisasi sebesar Rp. 5.653.147.730,- atau 97,04%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 172.705.183,- atau 2,69%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran, diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Persentase Realisasi Anggaran Barenlitbangda sebesar 94,64% lebih tinggi dari realisasi anggaran sebesar 97,04%, sehingga tingkat efisiensi sebesar -2,4%.

Analisis faktor penghambat/ kendala dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Perencanaan yang kurang matang.
- b. Keterlambatan penetapan Perubahan APBD.
- c. Adanya efisiensi anggaran APBD Tahun 2025.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Percepatan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama.
- c. Membuat TS ke Bapak Wali Kota Sawahlunto untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan alokasi dana yang cukup besar.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2025

- a. Menyusun perencanaan kinerja dan anggaran yang lebih matang.
- b. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Menghilangkan anggaran-anggaran yang tidak mendukung pencapaian kinerja pada perubahan anggaran.

3.4 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Anggaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto pada perubahan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.244.320.293,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.909.739.551,- atau sebesar 94,64%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang diimplementasikan dalam 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	100	95,04	95,04	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	292.384.350	140.232.270	52,04
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	91.968.830	88.922.234	96,69
2.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	100	100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	34.114.200	2.617.507	7,67
3.	Tercapainya Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	73	66,08	90,5				
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda	Nilai SAKIP Barenlitbangda	BB (70,1)	B (69,61)	99,4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	5.825.852.913	5.653.147.730	97,04

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
						Daerah Kabupaten/Kota			
5.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Barenlitbangda	Persentase Realisasi Anggaran Barenlitbangda	97	94,64	97,6				
	Capaian Kinerja				96,5	Capaian Anggaran	6.244.320.293	5.909.739.551	94,64
	Tingkat Efisiensi = % Rata-Rata Capaian Kinerja / % Rata-Rata Capaian Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi = 1								

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Barenlitbangda Tahun 2025, data diolah

Berdasarkan tabel 3.14 diatas, tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap capaian anggaran sebesar 101,9. Artinya efisiensi 1, artinya Barenlitbangda Kota Sawahlunto telah melakukan efisiensi sebesar 1% dari anggaran yang ada. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi/ penyerapan anggaran. Semakin besar nilai efisiensi, maka semakin efisien penggunaan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja sasaran.

Dalam hal ini, penggunaan anggaran sebesar 94,648% untuk pencapaian kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96,5%. Hal ini bisa diartikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pendukungnya belum sepenuhnya berhasil mencapai target 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu Indeks Kualitas Perencanaan, Indeks Inovasi Daerah, Nilai SAKIP Barenlitbangda dan Persentase Realisasi Anggaran Barenlitbangda, sehingga keempat indikator tersebut harus menjadi perhatian lebih bagi Barenlitbangda untuk Tahun 2026.

3.5 Penghargaan Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 pada Barenlitbangda Kota Sawahlunto ikut menunjang keberhasilan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diperoleh pada Tahun 2025 adalah Kota Sawahlunto menempati peringkat 29 secara nasional untuk kategori Kota dengan predikat Sangat Inovatif dengan skor Indeks 66,08 pada ajang penghargaan Indeks Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan Indeks Inovasi Daerah ini merupakan motivasi sekaligus apresiasi kepada pemerintah daerah dalam menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Gambar 3.1
Penghargaan Indeks Inovasi Daerah (IID)



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan suatu informasi yang utuh atas upaya terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel yang telah dilakukan dan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. Selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Sebagai instansi yang bertugas melaksanakan perencanaan, pengenalan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Barenlitbangda Kota Sawahlunto berusaha menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dengan sebaik mungkin, walaupun belum sesuai dengan target yang diharapkan dan sangat perlu penyempurnaan langkah-langka aksi di masa yang akan datang. Dari laporan kinerja pada Tahun 2024 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Catatan rekomendasi dari laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 oleh Inspektorat Kota Sawahlunto sudah ditindaklanjuti Tahun 2026.
2. Analisis terhadap sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan dengan realisasi kinerja sebesar 95,04 lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 100. Hal ini berarti bahwa Barenlitbangda Kota Sawahlunto harus berupaya lebih maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu kepala daerah dalam urusan perencanaan.
3. Analisis terhadap sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah, realisasi kinerja sebesar 100% yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya 100%.
4. Analisis terhadap sasaran 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda dengan indikator kinerja Nilai SAKIP, realisasi kinerja sebesar B (69,61) lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu BB

(70,1), sehingga capaian kinerjanya hanya 99,3%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto sudah baik, tetapi tetap perlu peningkatan khususnya komitmen dalam pencapaian kinerja.

5. Analisis terhadap sasaran 4 yaitu Tercapaiannya Peningkatan Inovasi Daerah dengan indikaor kinerja Indeks Inovasi Daerah, realisasi kinerja sebesar 66,08 lebih tinggi dari target yang ditetapkan 73, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan 90,5%.
6. Analisis terhadap sasaran 5 yaitu Optimalnya Pengelolaan Keuangan Barenlitbangda dengan indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Barenlitbangda, realisasi kinerjanya 94,64% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 97%, sehingga capaian kinerja yang diraih sebesar 97,6%.

4.2 Tindak Lanjut Kedepan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto dimasa yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Meningkatkan peran koordinasi dengan Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto dan stake holder terkait agar perencanaan pembangunan yang telah disusun bisa dijalankan sebaik mungkin demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
3. Mensosialisasikan dan melakukan upaya yang maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Barenlitbangda Kota Sawahlunto yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan dan Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Barenlitbangda Tahun 2024-2026, sehingga tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dapat tercapai.

4. Melakukan koordinasi internal yang lebih intensif agar peningkatan kinerja, baik dari level staf, fungsional dan eselon 3 serta eselon 2 bisa terus ditingkatkan.

Sawahlunto, Januari 2025
Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



I. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

LAMPIRAN

- 1. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
- 2. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2025**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. LELIS EPRIENTI, MSi**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Sawahlunto
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

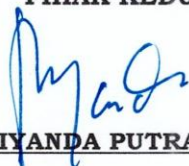
Nama : **RIYANDA PUTRA, SIP**
Jabatan : Wali Kota Sawahlunto
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 15 Oktober 2025

PIHAK KEDUA


RIYANDA PUTRA, SIP

PIHAK PERTAMA


Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan (IKU)	100
2.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah (%) (IKU)	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda	Nilai SAKIP Barenlitbangda	BB (70,1)
4.	Tercapainya Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	73
5.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Barenlitbangda	Persentase Realisasi Anggaran Barenlitbangda	97

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 5.825.852.913
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 292.384.350
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 91.968.830
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 34.114.200
Total	Rp 6.244.320.293

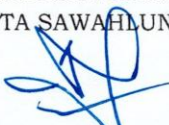
WALI KOTA SAWAHLUNTO



RIYANDA PUTRA, SIP

Sawahlunto, 15 Oktober 2025

KEPALA BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RONI ARMIS, ST. MT. MEng. PhD**
Jabatan : Sekretaris Barenlitbangda
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. LELIS EPRIENTI, MSi**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Sawahlunto
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 15 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

PIHAK PERTAMA

RONI ARMIS, ST. MT. MEng. PhD
NIP. 19800131 200501 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

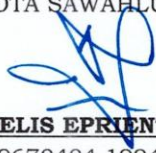
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda	Nilai SAKIP Barenlitbangda	BB (70,1)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Keuangan Barenlitbangda	Skala Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75
3.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas dengan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Internal Perangkat Daerah	4
4.	Tersedianya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi Sekretariat yang Dilaksanakan	1

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5.405.488.848	
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	5.357.740.848	
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan	Rp	47.748.000	
2. Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	89.111.585	
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp	7.509.975	
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	66.128.810	
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	15.472.800	
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	13.452.000	
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	13.452.000	
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	160.910.080	
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	1.000.000	
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	45.011.744	
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	114.898.336	
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	156.890.400	
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	112.278.400	
b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	27.482.000	

c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	17.130.000
--	----	------------

Total	Rp	5.825.852.913
--------------	-----------	----------------------

KEPALA BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

Sawahlunto, 15 Oktober 2025
SEKRETARIS BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO



RONI ARMIS, ST. MT. MEng. PhD
NIP. 19800131 200501 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSNELLY, SSTP. MSI**
Jabatan : Kabid. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. LELIS EPRIENTI, MSI**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Sawahlunto
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 15 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

Ir. LELIS EPRIENTI, MSI
NIP. 19670404 199403 2 008

PIHAK PERTAMA

GUSNELLY, SSTP. MSI
NIP. 19751227 200604 1 010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Mitra (%) Persentase Konsistensi Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Program RPD (%)	100 100
2.	Meningkatnya Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan PD	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti PD	100
3.	Terciptanya Penelitian dan Inovasi Perangkat Daerah	Persentase Penelitian dan Inovasi yang tercipta di PD Mitra	100
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting	2
		Jumlah Laporan Koordinasi Urusan Pendidikan	2
		Jumlah Laporan Koordinasi Perempuan dan Perlindungan Anak	2
5.	Tersedianya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi Bidang yang Dilaksanakan	1

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	20.664.820
a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	3.311.480
b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	3.286.330

- | | | |
|--|----|-----------|
| c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan | Rp | 7.026.860 |
| d. Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp | 1.218.400 |
| e. Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia | Rp | 2.967.150 |
| f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Manusia | Rp | 2.854.600 |

KEPALA BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. LELIS EPRIENTI, MSI
NIP. 19690404 199403 2 008

Sawahlunto, 15 Oktober 2025
KABID PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA



GUSNELLY, SSTP. MSI
NIP. 19830808 200112 2 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELVITA PUTRI ZAIN, STP**
Jabatan : Kabid. Penelitian dan Pengembangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir.LELIS EPRIENTI,M.Si**
Jabatan : Kepala Barenlitbangda
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 15 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

Ir. LELIS EPRIENTI, MSI
NIP. 19690404 199403 2 008

PIHAK PERTAMA

ELVITA PUTRI ZAIN, STP
NIP. 19800915 200502 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD Tahun 2026 terhadap Program RPD (%)	100
		Jumlah laporan capaian IKU dan IKD (laporan)	1
2.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah	Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah (%)	100
3.	Meningkatnya Sistem Aplikasi Pelaporan	Jumlah Fitur yang ditambahkan ke dalam Aplikasi Monev (fitur)	1
4.	Optimalnya Penguatan Inovasi Daerah	Persentase Penguatan Inovasi Daerah (%)	100
5.	Meningkatnya Koordinasi Satu Data Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Satu Data Indonesia (laporan)	1
6.	Tersedianya Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Bidang yang Dilaksanakan (Inovasi)	1

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran
1. Penyusunan Perencanaan dan	Rp	257.243.100
a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp	5.220.120
b. Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp	15.390.400
c. Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota	Rp	24.958.380
d. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/ Kota	Rp	211.674.200
2. Analisis Data dan Informasi	Rp	893.850
a. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp	893.850
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Rp	34.247.400

a.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp	34.247.400
4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp	34.114.200
a.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemeintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp	34.114.200
	Total	Rp	326.498.550

KEPALA BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19690404 199403 2 008

Sawahlunto, 15 Oktober 2025
KABID PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN



ELVITA PUTRI ZAIN, STP
NIP. 19800915 200502 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAIZURNI, ST. MM**
Jabatan : Kabid. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. LELIS EPRIENTI, MSI**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Sawahlunto
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 15 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

Ir. LELIS EPRIENTI, MSI
NIP. 19670404 199403 2 008

PIHAK PERTAMA

MAIZURNI, ST. MM
NIP. 19750505 200604 2 024

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Mitra (%)	100
		Persentase Konsistensi Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Program RPD (%)	100
2.	Meningkatnya Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan PD	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti PD	100
3.	Terciptanya Penelitian dan Inovasi Perangkat Daerah	Persentase Penelitian dan Inovasi yang tercipta di PD Mitra	100
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Bidang Infrastruktur Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pokja PKP	4
		Jumlah Laporan Koordinasi Pengendalian Emisi Gas Rumah	4
		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)	4
5.	Tersedianya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi Bidang yang Dilaksanakan	1
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Bidang PPIK	Persentase Realisasi anggaran Bidang PPIK	96

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp	36,994,160
a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	8,310,700

b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	7,090,300
c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	8,563,680
d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	2,997,400
e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp	4,441,180
f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp	5,590,900

KEPALA BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. LELIS EPRIENTI, MSI
NIP. 19690404 199403 2 008

Sawahlunto, 15 Oktober 2025
KABID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KOTA



MAIZURNI, ST. MM
NIP. 19750505 200604 2 024

LAPORAN REALISASI FISIK KOTA SAWAHLUNTO BULAN DESEMBER 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	S/D PERIODE LALU	PERIODE INI	PAGU TOTAL	REALISASI												Total Realisasi		
							Belanja Operasi			Belanja Modal			Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer					
							Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan	
								(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Belanja Operasi	6.366.547.630	6.244.320.293	5.349.317.905	560.421.646	5.909.739.551	96,64	5.909.739.551	94,64										96,64	5.909.739.551	94,64
	- Belanja Pegawai	5.142.507.455	5.357.740.848	4.781.222.120	505.618.052	5.286.840.172	100,00	5.286.840.172	98,68										98,68	5.286.840.172	98,68
	- Belanja Barang dan jasa	1.224.040.175	886.579.445	568.095.785	54.803.594	622.899.379	93,27	622.899.379	70,26										70,26	622.899.379	70,26
2	Belanja Modal	13.452.000	13.452.000	-	-	-	100,00	12.900.000	95,90										100,00	12.900.000	-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.452.000	13.452.000	-	-	-	100,00	12.900.000	95,90										0,00	12.900.000	-
				-	-	-	-	-	-										0,00	-	-
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-							-	-	-				-	-	-
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-							-	-	-				-	-	-
4	Belanja Transfer	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
	TOTAL	6.366.547.630	6.244.320.293	5.349.317.905	560.421.646	5.909.739.551	96,64	5.909.739.551	94,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,64	5.909.739.551	94,64



LAPORAN
REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK DAN KEUANGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
DAN BELANJA LANGSUNG KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

LAPORAN : DESEMBER
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	NAMA KEGIATAN	PENGUNA ANGGARAN (PA)	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	PPTK	DPA (Rp)	DPA PERUBAHAN (Rp)	TER KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN (%)	REALISASI KEMAJUAN KEUANGAN (%)	REALISASI KEUANGAN			JUMLAH	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET
											SPJ LS PEGAWAI	SPJ LS BARANG / JASA	SPJ UP/GU/TU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BELANJA DAERAH	Ir. Lelis Eprienti, Msi			6.366.547.630	6.244.320.293			96,67	94,64	5.286.840.172	149.911.012	472.988.367	5.909.739.551	334.580.742	
	BELANJA OPERASI				6.353.095.630	6.230.868.293			93,33	94,64	5.286.840.172	149.911.012	460.088.367	5.896.839.551	334.028.742	
	BELANJA MODAL				13.452.000	13.452.000			100,00	95,90	0	0	12.900.000	12.900.000	552.000	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
	PERENCANAAN				6.305.436.430	6.210.206.093			86,67	94,91	5.286.840.172	149.911.012	457.470.860	5.894.222.044	315.984.049	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Roni Armis, ST.MT.MEng. PhD	5.603.173.730	5.825.852.913			93,33	97,04	5.286.840.172	145.911.012	220.396.546	5.653.147.730	172.705.183	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.620.000	-			-	-	0	0	0	0	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.620.000	-			-	-	0	0	0	0	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.452.000	13.452.000			100,00	95,90	0	0	12.900.000	12.900.000	552.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.452.000	13.452.000			100,00	95,90	0	0	12.900.000	12.900.000	552.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.142.507.455	5.405.488.848			100,00	98,48	5.286.840.172	36.486.000	0	5.323.326.172	82.162.676	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.142.507.455	5.357.740.848			100,00	98,68	5.286.840.172	0	0	5.286.840.172	70.900.676	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	47.748.000			100,00	76,41	0	36.486.000	0	36.486.000	11.262.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				110.554.195	89.111.585			100,00	97,77	0	0	87.126.074	87.126.074	1.985.511	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.872.625	7.509.975			100,00	98,78	0	0	7.418.602	7.418.602	91.373	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				77.798.770	66.128.810			100,00	97,14	0	0	64.235.919	64.235.919	1.892.891	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.882.800	15.472.800			100,00	99,99	0	0	15.471.553	15.471.553	1.247	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155.560.080	160.910.080			100,00	90,89	0	105.830.912	40.425.402	146.256.314	14.653.766	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000	1.000.000			100,00	100,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.011.744	45.011.744			100,00	75,53	0	0	33.997.906	33.997.906	11.013.838	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				108.148.336	114.898.336			100,00	96,83	0	105.830.912	5.427.496	111.258.408	3.639.928	

NO	NAMA KEGIATAN	PENGGUNA ANGGARAN (PA)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	PPTK	DPA (Rp)	DPA PERUBAHAN (Rp)	TER KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN (%)	REALISASI KEMAJUAN KEUANGAN (%)	REALISASI KEUANGAN			JUMLAH	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET
											SPJ LS PEGAWAI	SPJ LS BARANG / JASA	SPJ UP/GU/TU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.480.000	156.890.400			66,67	61,47	0	3.594.100	92.845.070	96.439.170	60.451.230	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				137.868.000	112.278.400			100,00	77,17	0	3.594.100	83.050.070	86.644.170	25.634.230	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.482.000	27.482.000			-	-	0	0	0	0	27.482.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.130.000	17.130.000			100,00	57,18	0	0	9.795.000	9.795.000	7.335.000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ir. Lelis Eprienti, Msi			551.554.630	292.384.350			66,67	52,04	0	4.000.000	148.152.080	152.152.080	140.232.270	
	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian			Elvita Putri Zain, STP	540.234.980	257.243.100			100,00	56,34	0	0	144.930.085	144.930.085	112.313.015	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				5.220.120	5.220.120			100,00	96,95	0	0	5.060.920	5.060.920	159.200	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik				25.406.400	15.390.400			100,00	95,61	0	0	14.715.000	14.715.000	675.400	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				63.158.380	24.958.380			100,00	89,74	0	0	22.398.848	22.398.848	2.559.532	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				446.450.080	211.674.200			100,00	48,54	0	0	102.755.317	102.755.317	108.918.883	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Elvita Putri Zain, STP	4.252.250	893.850			-	-	0	0	0	0	893.850	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				4.252.250	893.850			-	-	0	0	0	0	893.850	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Elvita Putri Zain, STP	7.067.400	34.247.400			100,00	21,09	0	4.000.000	3.221.995	7.221.995	27.025.405	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				7.067.400	34.247.400			100,00	21,09	0	4.000.000	3.221.995	7.221.995	27.025.405	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				150.708.070	91.968.830			100,00	96,69	0	0	88.922.234	88.922.234	3.046.596	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ir. Lelis Eprienti, Msi		Gusnelly, SSTP. MSI	44.528.060	20.664.820			100,00	97,07	0	0	20.059.626	20.059.626	605.194	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5.831.480	3.311.480			100,00	95,12	0	0	3.149.770	3.149.770	161.710	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8.066.330	3.286.330			100,00	99,47	0	0	3.268.803	3.268.803	17.527	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				7.810.600	7.026.860			100,00	99,04	0	0	6.959.560	6.959.560	67.300	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				11.837.900	1.218.400			100,00	84,32	0	0	1.027.350	1.027.350	191.050	

NO	NAMA KEGIATAN	PENGUNA ANGGARAN (PA)	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	PPTK	DPA (Rp)	DPA PERUBAHAN (Rp)	TER KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN (%)	REALISASI KEMAJUAN KEUANGAN (%)	REALISASI KEUANGAN			JUMLAH	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET
											SPJ LS PEGAWAI	SPJ LS BARANG / JASA	SPJ UP/GU/TU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				7.127.150	2.967.150			100,00	95,21	0	0	2.824.893	2.824.893	142.257	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3.854.600	2.854.600			100,00	99,11	0	0	2.829.250	2.829.250	25.350	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Ir. Lelis Eprienti, MSI		Helmi Surya, ST.MT	50.969.850	34.309.850			100,00	93,68	0	0	32.140.411	32.140.411	2.169.439	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				10.045.400	7.045.400			100,00	98,55	0	0	6.943.231	6.943.231	102.169	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7.608.620	5.268.620			100,00	99,23	0	0	5.228.299	5.228.299	40.321	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				11.472.850	7.552.850			100,00	85,05	0	0	6.424.070	6.424.070	1.128.780	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				9.759.600	6.019.600			100,00	93,73	0	0	5.642.067	5.642.067	377.533	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6.386.360	4.586.360			100,00	92,34	0	0	4.234.964	4.234.964	351.396	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5.697.020	3.837.020			100,00	95,59	0	0	3.667.780	3.667.780	169.240	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Ir. Lelis Eprienti, MSI		Maizurni, ST.MM	55.210.160	36.994.160			100,00	99,26	0	0	36.722.197	36.722.197	271.963	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				11.714.700	8.310.700			100,00	99,39	0	0	8.259.820	8.259.820	50.880	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				13.430.300	7.090.300			100,00	98,88	0	0	7.011.110	7.011.110	79.190	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				9.963.680	8.563.680			100,00	99,65	0	0	8.533.800	8.533.800	29.880	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6.637.400	2.997.400			100,00	98,20	0	0	2.943.589	2.943.589	53.811	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				7.821.180	4.441.180			100,00	99,16	0	0	4.404.090	4.404.090	37.090	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				5.642.900	5.590.900			100,00	99,62	0	0	5.569.788	5.569.788	21.112	

NO	NAMA KEGIATAN	PENGGUNA ANGGARAN (PA)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	PPTK	DPA (Rp)	DPA PERUBAHAN (Rp)	TER KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN (%)	REALISASI KEMAJUAN KEUANGAN (%)	REALISASI KEUANGAN			JUMLAH	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET
											SPJ LS PEGAWAI	SPJ LS BARANG / JASA	SPJ UP/GU/TU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Ir. Lelis Eprienti, MSI		Elvita Putri Zain, STP	61.111.200	34.114.200			100,00	7,67	0	0	2.617.507	2.617.507	31.496.693	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				61.111.200	34.114.200			100,00	7,67	0	0	2.617.507	2.617.507	31.496.693	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				61.111.200	34.114.200			100,00	7,67	0	0	2.617.507	2.617.507	31.496.693	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif				61.111.200	34.114.200			100,00	7,67	0	0	2.617.507	2.617.507	31.496.693	
	JUMLAH				6.366.547.630	6.244.320.293			96,67	94,64	5.286.840.172	149.911.012	472.988.367	5.909.739.551	334.580.742	

Sawahlunto, Desember 2025
 KEPALA BAKTAN PERENCANAAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA SAWAHLUNTO

 Ir. LELIS EPRIENTI, MSI
 NIP. 19670404 199403 2 008

**LAPORAN : REALISASI KEGIATAN KONSTRUKSI TAHUN 2025
KEADAAN S/D BULAN DESEMBER**

[illegible]

134

LAMPIRAN IV : LAPORAN REALISASI APBN

**LAPORAN : REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
APBN 2025**

LAPORAN BULANAN : DESEMBER
TAHUN ANGGARAN : 2025
SATUAN KERJA PERANGKAT : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
DAERAH (OPD)

NO	NAMA KEGIATAN	PENGUNA ANGGARAN (PA)	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	PPTK	DPA (Rp)	TERKONTRAK (Rp)	PELAKSANA	REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN (%)	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI (Rp)			TOTAL (10 +13) (Rp)	SISA ANGGARAN (6 - 14) (Rp)	PERMASALAH AN DALAM PENCAPAIAN TARGET	
									SPM-GU (Rp)	SPM-LS (Rp)					
										Belanja Pegawai	Pengadaan Barang/ Jasa				Jumlah (11+12) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Sawahlunto, Desember 2025

KETUA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. CEUS EPILINTI, MSI
NIP. 196204031994032008

LAMPIRAN V : REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA

LAPORAN : REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/KONSULTANSI/JASA LAINNYA MELALUI PIHAK KETIGA
YANG DIBIYAI DARI DANA APBD KEADAAN S/D BULAN DESEMBER 2025

NAMA OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	JENIS PENGADAAN (BARANG/ KONSULTANSI/ JASA LAINNYA*)	PPK	PPTK	PAGU DANA PADA DPA AWAL (Rp.)	PAGU DANA PADA DPA PERUBAHAN (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA/NO. KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN			REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI (Rp.)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	PERMASALAH N
									MULAI	SELESAI	ADDENDU M WAKTU S/D TANGGAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pengadaan Laptop	Barang	Ir. Lelis Eprienti, MSI	Roni Armis, T. MT. MEng, PhD	13.452.000	-	12.900.000	-	22 Juli 2025	28 Agustus 2025	-	12.900.000	100	

Sawahlunto, Desember 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
Ir. LELIS EPRIENTI, MSI
NIP. 19670401199032008

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KOTA : SAWAHLUNTO
TRIWULAN : IV

[illegible]

13/11/20

NIP. 19670404 199403 2 008

